

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah nagari dalam rangka Menggagas Masa Depan nagari , tim penyusun yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN, Kepala Kampung, KPMN, Wakil Masyarakat, anggota Bamus dan Perangkat Nagari Amping Parak telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJM -Nagari

RPJM-Nagari adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Nagari Amping Parak yang menginginkan masa depan nagari yang lebih baik di segala bidang. Mimpi nagari akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi nagari dalam bentuk dokumen perencanaan nagari.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM-Nagari tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJM-Nagari ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJM-Nagari ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Nagari Amping Parak.

Amping Parak,
Tim Penyusun

COVER

PERATURAN NAGARI TENTANG RPJM Nagari

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Hal

BAB I. PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang		5
1.2. Maksud dan Tujuan		6
1.3. Landasan Hukum		7
1.4. Pengertian		9
BAB II. PROFIL NAGARI		
2.1. Kondisi Nagari		
2.1.1. Sejarah Nagari		12
2.1.2. Demografi Nagari		13
2.1.3. Keadaan Sosial		16
2.1.4. Keadaan Ekonomi		17
2.2. Kondisi Pemerintahan		
2.2.1. Pembagian Wilayah Nagari		19
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari.....		20
BAB III. POTENSI DAN MASALAH		
3.1. Potensi		22
3.2. Masalah		22
BAB IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI		
4.1. Visi dan Misi		
4.1.1. Visi		24
4.1.2. Misi		25
4.2. Kebijakan Pembangunan		
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari.....		32
4.2.2. Potensi dan Masalah		33
4.2.3. Program Pembangunan Nagari		34
4.2.4. Strategi Pencapaian		35
BAB V. PENUTUP		37

LAMPIRAN

1. Peta Sosial Nagari
2. Tabel data Potensi, Masalah dan Tindakan pemecahan Masalah
3. Matrik Keterkaitan Misi , Kebijakan , Sasaran, Indikator, Program Dan Kegiatan RPJM Nagari.
4. Tabel Rencana Pembangunan Nagari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Nagari adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Nagari, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Nagari (RKP Nagari).

RPJM Nagari Amping Parak ini merupakan rencana strategis Nagari Amping Parak untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Nagari tersebut , nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan dan selaras

dengan perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Amping Parak ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud Penyusunan RPJM Nagari

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah Nagari dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diharapkan dalam melakukan proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional BPD, dan Intensif Kepala Kampung bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Nagari setempat.

3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Nagari yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM Nagari

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Nagari, strategi pembangunan Nagari, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Nagari selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Nagari yang akan dibiayai oleh APBDDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Nagari terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;

1.4. Pengertian

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya di singkat (APB-Nagari) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
2. Nagari, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban nagari tersebut.
4. Lembaga Kemasyarakatan Nagari atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah nagari dalam Memberdayakan Masyarakat.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut (Musrenbang Nagari) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan seorang partisipatif oleh para pemangku kepentingan Nagari (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Nagari dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Nagari 1 (satu) Tahunan.
6. Pembangunan Nagari adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperimbangkan sumber daya yang tersedia.
8. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah / Daerah dalam jangka waktu tertentu
9. Perencanaan Pembangunan Nagari dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di nagari guna Pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu nagari dalam jangka waktu tertentu. Wujud perencanaan pembangunan nagari adalah Rencana Pembangunan jangka Menengah nagari dan Rencana kerja Pembangunan nagari.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat (RPJM-Nagari) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari, arah Kebijakan Keuangan Nagari, kebijakan umum, dan program dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

11. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat (RKP-Nagari) adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan ekonomi nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program Prioritas Pembangunan nagari, rencana kerja dan pendanaan disertai perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Nagari.

BAB II

PROFIL NAGARI

2.1 Kondisi Nagari

Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 12 Nagari di Kecamatan Sutura yang mempunyai jarak 48,7 Km dari ibu kota kabupaten. Kecamatan Sutura sendiri merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori nagari maju. Secara geografis Nagari Amping Parak sendiri terletak di perbatasan sebelah Selatan Dengan Kecamatan Lengayang , Utara Nagari Surantih, Sebelah Timur dengan Nagari Amping Parak Timur, sebelah Barat dengan Samudra Indonesia. Nagari Amping Parak letak topografis tanahnya berbukit, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat Nagari adalah petani.

Nagari Amping Parak terdiri dari 6 Kampung , dengan potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Wali Nagari, satu orang Sekretaris Nagari (Seknag), Dua Orang Kasi, Dua orang kaur dan 6 orang Kepala Kampung , mempunyai jumlah penduduk $\pm$ 9.095 terdiri dari 4.138 orang laki-laki, 4.957 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah **487** RTM.

2.1.1.1 Sejarah Desa

Dengan lahirnya perda provinsi Sumatera Barat nomor :09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari serta ditindak lanjuti dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari (yang di perbaharui melalui perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 08 tahun 2007), maka berubahlah bentuk pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat dari pemerintah Desa menjadi Pemerintahan Nagari.

Nagari Amping Parak salah satu adalah salah satu kenagarian dalam Bandar sepuluh yang berada didalam daerah Kecamatan Batang Kapas , Kabupaten pesisir Selatan, yang terletak dan diapit oleh Nagari Surantih di utara dengan Nagari Kambang di sebelah Selatan adalah salah satu Nagari Bandar sepuluh dan susunan Pemerintahan adalah Rajo – rajo di dalam kekelarasan Koto Piliang

Batas sepadan Nagari Amping Parak

1. Sebelah Utara dengan Nagari Surantih.
 - a. Mulai dari laut dengan kaki bukit Batu Mandamai sebelah kebalik ujung (dahulunya dengan Gunung Rajo)
 - b. Kelok jalan besar dari Alai ke Sungai Sirah, terus kepuncak Gunung Girik
 - c. Terus ke hulu,dengan kayu Gadang,bukik aur,Batas Koto Tinggi, Puncak Pendakian Kayu Aro, langgai dan Gunung Haraimau
2. Sebelah Selatan Dengan Nagari Kambang
 - a. Mulai dari Laut dengan Pinago Baselo, terus ke bukit Carano
 - b. Sebelah Kehulu dengan Bukit Sarang Anggang

Nagari Amping Parak dalam pemerintahan menurut adat di bagi dalam 2 bagian yaitu

1. Daerah “ Berdakung Mudik “

Yang disebut juga dengan Koto NanTigo :

 1. Koto Ranah
 2. Koto Tinggi
 3. Sungai Kumbang

2. Daerah “Badakuang Hilir “

Daerah di Bagi dua Pula

a. Limbur Pasang Mudik

Limbur Pasang Mudik meliputi daerah Padang Bajakan, Taratak paneh, Sikabu, Sungai Jukuik Tanjung Gadang dan Bukik Kaciak.

b. Limbur Pasang Hilir

Limbur pasang Hilir adalah daerah yang meliputi dari Koto Tarok, Sampai ke hilir, Padang Laweh, Pasar Amping Parak, Alai, Padang Tae dan Ujung Air.

Yang disebut daerah Limbur Pasang adalah daerah yang terletak apabila Pasang Naik (Pasang Anak bulan), air Batang Amping Parak yang mengalir melalui daerah tersebut atau terletakse hamparan dengan daerah tersebut juga ia mendapat limbuhan / desakan dari air laut yang masuk ke muara batang air Amping Parak.

PENDUDUK NAGARI AMPING PARAK

Sebagaimana di sebutkan di dalam kata – kata adat Minang Kabau ,Bahwa Nagari Ba-Ampek suku, suku babuah paruik , bahwa setiap Nagari di dalami oleh orang –orang yang tergolong dalam keturunan daerah dari empat suku induk dan di Nagari Amping Parak adalah

I. **SUKU MELAYU EMPAT NINIAK** yang terdiri dari

1. Melayu Tengah
2. Melayu Koto Kaciak
3. Melayu Bariang

4. Melayu Durian
- II. **SUKU KAMPAI EMPAT TUAH LAMBUNG (PARUIK)**Yaitu terdiri dari
 1. Kampai Tengah
 2. Kampai Sawah Laweh
 3. Kampai Niur Gading
 4. Kampai Bendang
- III. **SUKU PANAI TIGO IBU** Yaitu terdiri dari
 1. Panai Tengah
 2. Panai Lundang
 3. Panai Tanjung
- IV. **TIGO LAREH NAN BATIGO** Yaitu terdiri dari
 1. Sikumbang
 2. Jambak
 3. Caniago

STRUKTUR PEMERINTAHAN NAGARI MENURUT ADAT

Struktur pemerintahan Nagari Amping Parak menurut adat di pegang oleh seorang RAJO, yang di panggildengan nama TUANKU, yang di bantu oleh empat orang penghulu dari suku melayu empat buah Paruik , yang di sebut SANDI RAJO ,empat orang penghulu pucuk dari nan Ampek, serta SANDI PENGHULU ,atau disebut juga penghulu Andiko,dari Ka-ampek suku yang di dalam Nagari Amping Parak dan begitu juga diikutsertakan kaum ulama yang disebut KAUM SARAK, IMAN dan KHATIB.

Rajo tumbuh secara turun – temurun dan suku empat buah paruik dan diutamakan dalam parik SUTAN , dan apabila dalam paruik SUTAN tidak ada yang mungkin menjadi Rajo, maka diambilkan dari Paruik BANDARO, dan jika dalam BANDARO tidak ada yang patut, maka diambilkan dari paruik BAGINDO dan apabila dari ketiga paruik tersebut tidak ada yang patut menjadi pucuk pimpinan Nagari maka diambilkan dari suku NAN AMPEK. Yang diutamakan ada hubungan dengan kaum Rajo seperti anak Pisang ataupun cucunya. Didalam hal ini sudah terjadi dua tiga kali. Diantaranya BAGAK dengan nama SUTAN HIDAYAT dengan gelar MARAH BATUAH dari suku caniago, mati dan berkubur di Pasar Amping Parak.

Untuk suku nan empat yang berhak menjadi RAJO adalah sebagai berikut

1. KAUM MELAYU EMPAT BUAH PERUT

1. PARUIK BANDARO kalau gelaran paruik ini menjadi Rajo , maka bergelar TUANKU BANDARO LELO ALAM dan diketahui paruik ini baru 2 kali menjadi rajo yaitu
 - a. Rajo yang ke -6 GANDO ALAM yang bergelar TUANKU BANDARO LELO ALAM berkubur di Koto Baru dekat tapian Sasek
 - b. Rajo yang ke -12 MOHAMD SAHUR yang bergelar TUANKU BANDARO LELO ALAM yang berkubur di Psar Amping Parak pada tanggal 28 oktober 1965 yang merupakan kepala Nagari terakhir yang memerintah di Nagari Amping Parak, karena setelah kemerdekaan system Pemerinthan Nagari Sumatera Barat diganti dengan Pemerinthan Wali Nagari dan dibawahnya wali kampong

2. KAUMBAGINDO kalau kaumini menjadi Rajo, maka gelar TUANKU BAGIBNDO MULIA dan kaum ini belum pernah mejabat sebagai secara bergeliran yang di mufakati sebagai Rajo dan kebetulan ATAP gelar BAGINDO ALI di tunjuk sebagai wakil kepala Nagari Amping Parak, yang menunggu di pilihnya Pengganti TUANKU MARAH DJANUN yang wafat di Padang tahun 1941.
3. PERUT SUTAN kalau kaum ini menjadi RAJO, maka ia di beri gelar TUANKU BAGINDO SUTAN BASA (Besar) dan memang sudah menjadi ketentuan bahwa dari perut SUTAN yang di utamkan menjadi Kepala Pemerintahan Nagari Amping Parak dan sepanjang diketahui bahwa dari daru Parui SUTAN sudah 6 kali menjadi Rajo. Mulai dari yang pertama TUANKU NAN BADAGOK PUTIH, begelar Tuanku Bagindu Sutan besar yang ber kubur di bukit Gobah, ujung Bukit Gintan. Dan yang ke Sepuluh (10) adalah SUTAN DJAMAT bergelar tuanku BAGINDO SUTAN BESAR yang berkubur di Balai Lamo Pasar Amping Parak
4. PERUT IMAM SAMBA yang bergelar BAGINDO RAJO dan bertugas sebagai IMAM (Atau ikitan orang banyak) dalam melakukan penyebuhan sewaktu raja di nobatkan.

Siapa menjadi Rajo didalam suku melayu, maka diamenjadi penghulu pucuk dalam kaum suku melayu empat buah perut, yang didalamnya di dibantu oleh 4 (empat) orang penghulu yang di sebut SANDI RAJO yang sedrajat dengan penghulu pucuk yaitu :

1. Bandaro Alam
2. Bagindo Ali
3. Bagindo Rajo

Karena Agama Islam telah berkembang dengan pesat ,maka diikut sertakan pula para ulama yang di sebut sebagai” Barampek dalam Syarak “ yang artinya seorang ulama yang diambilkan dari kaum melayu empat buah perut yang di sebut juga kali Rajo dengan gelar KALI BRAHIM, selaku pucuk dalam syarak.

Kedudukan Rajo berada di daerah “ BADANGKUANG HILIR “ keran perhubungan kedaerah serasa suli maka RAJO selaku Kepala Pemerinthan membagi 2 (dua) daerah yaitu :

I. DAERAH BADANKUNG MUDIK

Susunan Pemerinthannya di sebut dengan istilah “BARAMPEK BALIMO dengan URANG TUO “ 1(satu) orang TUO sebagai mewakili rajo yang bergelar RAJO YAMAN dari suku sukumbang ia di damping 4 orang penghulu oucuk dari suku nan empat Yaitu:

- a. DATUAK RAJO BAGINDO dari Kampai SAWAH Dalam
- b. DATUAK TAN LARANGAN dari melayu tengah
- c. DATUAK RAJO BATUAH dari Panai Lundang
- d. DATUAK RAJO KAYO dari Sikumbang
- e. DATUAK KANDO MARAJO dari caniago
- f. Dari Suku Jambak tidak ada

Selain dari 4 orang penghulu pucuk, juga di bantu oleh penghulu Suk/Sandi/Manti yang di sebut dengan istilah “Barampek Balimo dalam Adat “

1. Penghulu dari suku Kampai Buah Lambung :

- a. Didalam Kampai sawah laweh, bergelar DATUAK RAJO BINTANG
- b. Dalam kampai tengah begelar DATUAK BANDARO HITAM, MANATI ADAT.....
- c. Dalam Kampai Nlur Gading tidak ada,.....
- d. Dalam Kampai Bendang tidak ada,.....

2. Penghulu dalam suku Melayu Empat Ninik :

- a. DalamMelayu tengah, bergelar DATUAK SATI, Andiko / Sandi.....
- b. DalamMelayu Durian bergelar DATUAK NAN KODO RAJO,manti adat,-----
- c. Dalammelayu bariang tidak ada,.....
- d. DalamMelayu Koto Kaciak tidak ada,.....

II. DAERAH BADA KUANG HILIR

Daerah Badakuang Hilir terbagi dua yaitu : Limbur pasang Hilir.

I. LIMBUR PASANG MUDIK

Pemerintahan mempunyai istilah ‘ BARAMPEK BALIMO DENGAN RAJO ‘

Yang artinya pemerintahn di lakukan oleh empat orang penghulu pucuk dari suku Nan Ampek, dengan pucuk pimpinanya adalah :

1. Dalam Suku Kampai Tengah, bergelar DATUAK RAJO HITAM

2. Dalam Suku melayu Empat Niniak :
 - a. Dalam melayu Bariang, begelar DATUK SAMPONO BATUAH.
 - b. Dalam melayu Durian Bergelar DATUAK TAN LARANGAN
3. Dalam Suku Panai bergelar DATUAK PUTIAH
4. Dalam Suku Tigo Lareh bergelar dengan
 - a. Dalam Suku Jambak Bergelar DATUAK TAN MAJO LELO
 - b. Dalam Suku Caniago bergelar DATUAK GADANG / DATUAK RAJO JOHAN
 - c. Dalam Suku Si kumbang bergelar DATUAK SAMAD DI RAJO

Dan di bantu oleh Penghulu Andiko (Sandi Penghulu) dari suku Nan Ampek Yaitu.

1. Dari Suku Kampai Niur Gading dengan gelar DATUAK RAJO KAMPAI
2. Dari Suku Kampai Sawah Laweh, tidak ada di daerah ini
3. Dari Suku Kampai Tengah, tidak di daerah ini
4. Dari Suku Bendang, tidak ada di daerah ini

Dari Suku Melayu :

1. Dari suku melayu tengah yaitu DATUAK RAJO JALIL
2. Dari Suku Melayu DURIAN Yaitu DATUAK RANG BATUAH GUNUNG AMEH
3. Dari Suku Melayu Bariang yaitu DATUAK BANDARO PANJANG
4. Dari Suku Melayu Koto Kaciak yaitu DATUAK RAJO LELO

Dari Suku Panai :

1. Dari Suku Panai Tengah yaitu DATUAK RAJO ALAM
2. Dari Suku Panai Lundang yaitu DATUAK KAYO

3. Dari Suku Tanjung yaitu DATUAK BANDARO PANAI

Dari Suku III Lareh

1. Dari Suku Sikumbang yaitu DATUAK RAJO INDO
2. Dari Suku Jambak DATUAK RAJO BAGAMPO
3. Dari Suku Caniago Yaitu DATUAK PATIH

Penghulu dalam Suku Panai Tigo Ibu :

- a. Dalam Panai Tengah bergelar DATUAK MALINTANG PANI
- b. Dalam Panai LUNDANG bergelar DATUAK MANIKAM SATI, manti adat,
- c. Dalam Panai Tanjung tidak ada,

Penghulu dalam Suku Tigo Lareh :

- a. Dalam sikumbang bergelar DATUAK RAJO INDO, Andiko/Sandi,
- b. Dalam Caniago bergelar DATUAK KANDO MAHARAJO, manti adat,
- c. Dalam Melayu Bariang tidak ada,
- d. Dalam Suku jambak tidak ada,

Kemudian untuk istilah “ BARAMPEK BALIMO DALAM SYARAK “

1. Ulama dalam Suku Kampai:
 - a. Dalam Suku Kampai Tengah, bergelar MALIN MANDARO
 - b. Dalam Suku Panai Tengah bergelar MALIN KARAJAN
 - c. Dalam Suku Melayu Bergelar MALIN SUTAN
 - d. Dalam Suku Caniago bergelar PETO SARI
2. Ulama dalam Suku Kampai Empat Buah lambung :

- a. Dalam Kampai Sawah Laweh, bergelar DATUAK RAJO BINTANG
- b. Dalam Tengah bergelar DATUAK BANDARO HITAM, Manti Adat,.....
3. Ulama dalam Melayu empat Niniak :
 - a. Dalam Melayu Tengah, bergelar DATUAK SATI
 - b. Dalam Durian bergelar DATUAK NAN KODO RAJO, Manti adat,.....
4. Penghulu dalam Suku Panai Tigo Ibu :
 - a. Dalam Panai Tengah, bergelar DATUAK MALINTANG PANAI
 - b. Dalam Panai Lundang bergelar DATUAK MANIKAM SATI, Manti adat,.....
5. Penghulu dalam Suku Tigo lareh :
 - a. Dalam Bergelar DATUAK RAJO Indo, Andiko, /Sandi,.....
 - b. Dalam Caniago bergelar DATUAK KANDO MAHARAJO, manti adat,.....

Karena adat sudah bersandi syarak , maka kehadiran para ulama di kenal dengan istilah “ BARAMPEK BALIMO SYARAK” yaitu :

1. Dari Suku Melayu begelar IMAM MARAJO
2. Dari Suku Kampai tidak ada
3. Dari Suku Panai bergelar IMAM BATUAH
4. Dari Suku III Lareh
 - a. Imam Saidi Dari Jambak
 - b. Imam Sampono Kayo dari Caniago.

II. LIMBUR PASANG HILIR

Pemerintahannya mempunyai Istilah BARAMPEK BALIMO DENGAN RAJO “ yang artinya pemerintahan dilakukan oleh empat orang penghulu dari Melayu buak paruik dengan semua itu di sebut Kampung Dalam

Penghulu – penghulu tersebut sama kedudukannya dengan penghulu pucuk yaitu :

1. Dalam Paruik BANDARO, bergelar BANDARO ALAM.
2. Dalam Paruik BAGINDO , bergelar BAGINDO ALI
3. Dalam Paruik SUTAN bergelar SUTAN SARIPADO
4. Didalam PARUIK IMAM SAMBAH bergelar BAGINDO RAJO

Dan dibantu oleh ulama yang di sebut kaum syarak yaitu

1. Dalam Paruik BANDARO, bergelar KHATIB BANDARO
2. Dalam Paruik BAGINDO , bergelar KHATIB BAGINDO
3. Dalam Paruik SUTAN bergelar KALI BERAHIM / KALI RAJO
4. Didalam PARUIK IMAM SAMBAH

SUSUNAN RAJO – RAJO /KEPALA NAGARI / WALI NAGARI AMPING PARAK

1. TUANKU NANBAGOMBAK PUTIAH dari Paruik SUTAN, yang bergelar TUANKU BAGINDO BESAR, berkubur di bukit Gombak, Ujung bukit Gitan
2. TUANKU DISAMBAH dari paruik SUTAN yang bergelar TUANKU BAGINDO SUTAN BESAR berkubur di Bukit Tarok
3. TAN NALIM /TUANKU NAN SONSANG berkubur di bukit Tarok
4. DUMIN, gelar TAN PIAMAN bersal dari Suku nan Ampek

5. SUTAN JOLANG gelar TUANKU BAGINDO SUTAN BESAR dari Paruik Sutan Juga, di panggil dengan TUANKU HITAM,berkubur di bukit Rubiah
 6. GANDO ALAM dari Paruik Bandaro, bergelar TUANKUBANDAROLELO ALAM, berkubur di Koto Baru dekat tapian sasek
 7. Sebagai Wakil, NADU bergelar RAJO KUASO, berkubur di Pasar Lamo
 8. BAGAK / SUTAN HIDAYAT bergelar MARAH BATUAH, dari suku caniago,berkubur di PasarAmping Parak
 9. SUTAN BESAR bergelar TUANKU BAGINDO Sutan BESAR berkubur di Pasar Amping Parak.
 - 10.SUTAN JIMAT,bergelar TUANKU BAGINDO SUTAN BESAR ,berkubur di Balai Lamo
 - 11.MARAH JANUN, bergelar DATUAK SAMPONO NAN BATUAH dari suku Melayu bariang,mati dan di kubur di Padang
 - 12.Wakil Kepala Nagari,atap gelar BAGINDO ALI, menjalankan Pemerintahan sementara menunggu pengangkatan yang syah pucuk pinpinan baru
 - 13.MOHAMMAD SAHUR, bergelar TUANKU BANDARO LELO ALAM, Rajo terakhir pada tahun 1946 Pemerintahan Wali Nagari
- Setelah kemerdekaan sietempemerintahan Nagari di Sumatera Barat di sergamkan, disebut Wali Nagari, sebagai kepala Pemerintahan Nagari dan di bantu oleh kepala kampung.

SUSUNAN WALI NAGARI AMPING PARAK MULAI TAHUN 1946

1. SAMAR IDRIS bergelar MALIN SULEMAN,Caniago adalah Wali Nagari Pertama
2. ILYAS THAHAR Bergelar MALIN RAJO Suku melayu
3. KAJAI gelar TAN PARIO,suku Panai
4. ILYAS THAHAR begelar MALIN RAJO suku melayu
5. KHATIB RAHMAN
6. DJINIR Gelar Rajo Putih
7. KHATIB RAHMAN
8. BUYUANG GADANG RAJO JOHAN
9. YUSMAN YUSUF
- 10.MILUS
- 11.Ir. BUSTAMI

Kemudian sesuai peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang daerah otonomi ,maka masyarakat bersama tokoh – tokonya bersama – sama menyatakan sikapmelakukan pemekaran wilayah menjadi 2 wilayah pada tahun 2009 yaitu : Nagari Amping Parak Timur . Untuk Nagari Amping Parak di bagi kedalam enam Kampung yaitu Kampung Alai, Pasar Amping Parak, Padang Tae, Ujung Air, Padang Lawe, Koto Tarok. Selama masa pemekaran, sebelum dipilinya Wali Nagari depenitif, maka untuk sementara Pemerintahan Nagari Amping Parak di pimpin oleh Pejabat Sementara (PJS) yaitu HABIL RIVA'I yang diangkat oleh pihak Kecamatan .Pada Hari Jum'at tanggal 15 januari 2010 di lantik lah Wali Nagari terpilih Yaitu Ir.BUSTAMI Yang bersal dari dari pemilihan suara terbanyak masyarakat yang berasal dari suku caniago.

Dengan lahirnya perda provinsi Sumatera Barat nomor :09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari serta ditindak lanjuti dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari (yang

di perbaharui melalui perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 08 tahun 2007), maka berubahlah bentuk pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat dari pemerintah Desa menjadi Pemerintahan Nagari.

2.1.2 Demografi

a) Batas Wilayah Nagari

Letak geografis Nagari Amping Parak , terletak diantara :

Sebelah Utara	: Nagari Surantih
Sebelah selatan	: Kecamatan Lengayang
Sebelah Barat	: Samudra Hindia
Sebelah Timur	: Nagari Amping Parak Timur

Luas Wilayah Nagari

1. Pemukiman	: 95 ha
2. Pertanian Sawah	: 79 ha
3. Ladang/tegalan	: 106 ha
4. Hutan	: 643 ha
5. Rawa-rawa	: 1 ha
6. Perkantoran	: 2 ha
7. Sekolah	: 2 ha
8. Jalan	: 100 ha
9. Lapangan sepak bola	: 1 ha

b) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 8 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten	: 45 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 60 Menit

c) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga	:	2.361	KK
2. Laki-laki	:	4.138	Orang
3. Perempuan	:	4.957	Orang
4. Total Penduduk	:	9.095	Orang

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1. SD/ MI	:	200	Orang
2. SLTP/ MTs	:	2.700	Orang
3. SLTA/ MA	:	2.000	Orang
4. S1/ Diploma	:	4.000	Orang
5. Putus Sekolah	:	195	Orang
6. Buta Huruf	:	-	Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD	:	10 buah/ Lokasi di	Enam Kampung
2. SD/MI	:	7 buah/ Lokasi di	Enam Kampung,
3. SLTP/MTs	:	2 buah/ Lokasi di	Kampung Ps. Amping Parak

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini	:	50	orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini	:	2	orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 50 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - orang
- c. Cakupan Imunisasi
 1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 1.000 orang
 2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 1.000 orang
 3. Cakupan Imunisasi Cacar : 5.000 orang
- d. Gizi Balita
 1. Jumlah Balita : 200 orang
 2. Balita gizi buruk : - orang
 3. Balita gizi baik : 200 orang
 4. Balita gizi kurang : 2 orang
- e. Pemenuhan air bersih
 1. Pengguna sumur galian : 1.360 KK
 2. Pengguna air PAM : 800 KK
 3. Pengguna sumur pompa : 20 KK
 4. Pengguna sumur hidran umum : - KK
 5. Pengguna air sungai : - KK
- d). Keagamaan.
 1. Data Keagamaan Nagari Amping Parak Tahun 2017
Jumlah Pemeluk :

- Islam	:	8.499	orang
- Katolik	:	-	orang
- Kristen	:	-	orang

- Hindu : - orang
- Budha : - orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 18 buah
- Gereja : - buah
- Pura : - buah
- Vihara : - buah

2.1.3 KEADAAN EKONOMI

Penerimaan pajak tahun 2010 sebesar Rp. 16.253.868 adapun peningkatan pajak diharapkan pada bangunan baru/rumah bertambah dan kenaikan tarif.

Penerimaan Pendapatan Tanah Kas tahun 2010 sebesar Rp. 00.000.000, Tanah Kas Nagari disewakan kepada masyarakat untuk ditanami tanaman pangan, harga sewa tiap tahun meningkat untuk menyesuaikan tahapan perkembangan ekonomi.

Penerimaan DPDK / ADD tahun 2010 sebesar Rp.138.649.700, DPD/K adalah dana pembangunan desa yang bersumber dari pemerintah, besaran dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.

ADD atau Alokasi Dana Desa adalah dana APBD Kabupaten besaran dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB

Berikut ini adalah sumber Pendapatan dan penghasilan masyarakat Amping Parak:

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	:	120 ha
2. Padi Ladang	:	30 ha
3. Jagung	:	1 ha
4. Palawija	:	2 ha
5. Tembakau	:	- ha
6. Tebu	:	2 ha
7. Kakao/ Coklat	:	200 ha
8. Durian	:	35 ha
9. Karet	:	2 ha
10. Kelapa	:	10 ha
11. Kopi	:	2 ha
12. Singkong	:	6 ha
13. Lain-lain	:	4 ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	:	100 ekor
2. Sapi	:	1000 ekor
3. Kerbau	:	100 ekor
3. Ayam	:	3000 ekor
4. Itik	:	500 ekor

5. Burung : 100 ekor

6. Lain-lain : - ekor

c). Perikanan

1. Tambak ikan : 2 ha

2. Tambak udang : 1 ha

3. Lain-lain : - ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

Mata Pencaharian :

A. Buruh Tani	420
B. Petani	1.682
C. Peternak	
D. Pedagang	3.000
E. Tukang Kayu	312
F. Tukang Batu	
G. Penjahit	95
H. PNS	200
I. Pensiunan	
J. TNI/POLRI	20
K. Perangkat Nagari	15
L. Pengrajin	
M. Industri Kecil	20
N. Buruh Industri	13
O. Lain-lain	

2.2. Kondisi Pemerintahan Nagari

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah Perangkat Nagari :

1. Wali Nagari	:	1	orang
2. Sekretaris Nagari	:	1	orang
3. Perangkat Nagari	:	13	orang
4. BAMUS	:	5	orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPMN	:	15	orang
2. PKK	:	35	orang
3. Pustu	:	1	unit
4. Pengajian	:	6	Kelompok
6. Simpan Pinjam	:	50	Kelompok
7. Kelompok Tani	:	10	Kelompok
11. Lain-lain	:	-	Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Kampung :

1. Kampung Alai	:	Jumlah	1.180	Orang
2. Kampung Pasar Amping Parak	:	Jumlah	2.086	Orang
3. Kampung Padang Tae	:	Jumlah	1.820	Orang
4. Kampung Ujung Air	:	Jumlah	1.371	Orang

- | | | |
|------------------------|----------------|-------|
| 5. Kampung Padang Lawe | : Jumlah 1.229 | Orang |
| 6. Kampung Koto Tarok | : Jumlah 1.409 | Orang |

d). Struktur Organisasi Nagari

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NAMA-NAMA PERANGKAT NAGARI :

Wali Nagari	:	Yusmardi
Sekretaris Nagari	:	Yendri
Kepala Urusan Tata Usaha Umum	:	Hasridalianis,SE
Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	:	Rudi Hartono,SE
Kepala Seksi Pemerintahan	:	Nurdin Amrullah
Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	:	Ronny Kurniawan,S.Pi
Bendahara	:	Desi Efrita yeni, Spd
Kepala Kampung		
1. Kampung Alai	:	Syafridal
2. Kampung Ps Amping Parak	:	Suhelmi
3. Kampung Padang Tae	:	Mardelison
4. Kampung Padang Lawe	:	Ali Mardi
5. Kampung Ujung Air	:	Dol Marsikal
6. Kampung Koto Tarok	:	Syahrial

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI

Ketua	:	Irwan Desri Naldi
Wakil Ketua	:	Mustafa Kamal,SH
Sekretaris	:	Salman MT
Anggota	:	1. Nurmis 2. Edi Sunjaya

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

1.1. Potensi

Jika ditinjau dari segi sumber daya alam Nagari Amping Parak sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam bagus, karena di Nagari ini banyak memiliki sumber daya alam berupa batu, material (sirtu), dan perkebunan Sawit, serta lahan pertanian yang begitu subur dimana kesemuanya itu siap untuk diolah.

Dengan demikian hubungan dengan pelaksanaan kegiatan di dalam Nagari misalnya pembukaan dan perkerasaan Jalan Usaha tani tidak ada kendala sama sekali karena material ada di dalam Nagari sehingga secara otomatis pendapatan masyarakat juga dapat meningkat, terlebih lagi bagi masyarakat yang memiliki material batu dapat diangkut dan dijual kemana saja karena jalannya atau jalur transportasi sudah tersedia, termaksud lahan pertanian yang juga siap diolah oleh masyarakat.

Dari sisi pengembangan Usaha Masyarakat Nagari Amping Parak juga tidak ketinggalan dengan nagari- nagari lainnya karena di dalam nagari ini juga terdapat masyarakat sebagai pelaku usaha walaupun dalam skala kecil, mengingat modal yang dimiliki juga kecil sehingga besar kecilnya suatu usaha tergantung pada besar kecilnya modal yang dimiliki.

Demikianlah gambaran potensi yang ada di Nagari Amping Parak baik itu potensi Sumber daya Alam (SDA) maupun potensi Sumber daya Manusia (SDM).

1.2. Masalah

Nagari Amping Parak yang memiliki masyarakat yang mayoritas petani dengan tingkat pendidikan masih rendah tentu banyak memiliki kendala dan permasalahan-permasalahan yang di hadapi, begitu permasalahan yang hubungannya dengan sarana umum atau infrastruktur social maupun

hubungannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan kapasitas masyarakat serta pemenuhan segala kebutuhan hidup sehari-hari adapun masalah yang dihadapi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Jalur transportasi yang masih belum mendukung sehingga masyarakat susah dalam memobilisasi dari pada hasil-hasil pertanian mereka.
- b. Jalur transportasi yang ada hanya satu sehingga masyarakat rata-rata membuka lahan perkebunan terfokus pada satu arah satu tempat, mengingat sedikit ada kemudahan dalam mengangkut hasil pertanian. Sementara masih banyak lahan-lahan yang belum dikelola dengan baik.
- c. Tidak adanya sarana kesehatan yang memadai
- d. Kurang modal usaha yang di miliki oleh masyarakat
- e. Tidak adanya saluran-saluran pembuangan air seperti Deuker dan Drainase sehingga jika hujan lebat sudah 36ating maka pemukiman warga sebagian terencam banjir.
- f. Sering bermasalahnya lampu penerangan di dalam Nagari karena kurangnya perawatan yang memadai
- g. Tidak Adanya Jalur evakuasi tsunami yang memadai
- h. Kurangnya Fasilitas MCK untuk RTM
- i. Bedah Rumah untuk masyarakat tidak mampu
- j. Bantuan Rumah untuk masyarakat miskin
- k. Penambahan Buku dan Mobiler Perpustakaan Nagari
- l. Bantuan Bibit Unggul dan Pupuk bersubsidi
- m. Kurangnya Fasilitas mesin dan alat tangkap Nelayan
- n. Kurang nya Fasilitas Posyandu
- o. Kurang nya APE dalam dan APE Luar TK PAUD

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau Visi juga dapat diartikan gambaran perwujudan masa depan yang diinginkan, yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Nagari dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari.

Penetapan visi pembangunan Nagari, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Nagari, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Nagari mencapai kondisi yang yang diharapkan.

- Visi Pembangunan Nagari Amping Parak Jangka Menengah Tahun 2017-2023 adalah :

“TERWUJUDNYA NAGARI AMPING PARAK

YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERBUDAYA ISLAMI

- Pengertian dari Visi Yaitu :

Sejahtera : Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir

bathin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dengan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Nagari yang berbasis pada potensi Nagari Amping Parak yang berdaya jual dan berdaya saing.

Mandiri : Mendorong masyarakat agar terciptanya masyarakat tangguh dan siaga terhadap berbagai ancaman yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam dan / atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa kerugian harta benda kerusakan lingkungan dan dampak psikologis lainnya.

Berbudaya Islami Menciptakan suatu kondisi masyarakat yang senantiasa berpegang teguh pada keyakinan beragama. Karena di Nagari Amping Parak semua penduduknya beragama Islam maka sangat diharapkan semua tindakan yang dilakukan senantiasa berpedoman pada Al-Quran dan sunnah Rosul Sholallahu 'alaihi Wasalam serta melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai adat, budaya dan agama (Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Khitabbullah) dalam setiap sendi kehidupan. Sehingga akan terciptanya masyarakat yang mempunyai solidaritas dan kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi atau Misi adalah kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan diatas dapat tercapai dengan memperhatikan kondisi objektif Nagari.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Nagari, maka misi pembangunan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Jangka Menengah Tahun 2017-2023 dirumuskan sebagai berikut :

Misi 1 : Membangun pemerintahan Nagari yang profesional, efisien, efektif dan bertanggung jawab.

Misi membangun pemerintahan Nagari yang profesional, efisien, efektif dan bertanggung jawab dicapai melalui perwujudan sistem pemerintahan Nagari yang baik dan meningkatnya kemampuan serta Kualitas Kinerja pemerintahan Nagari. Terselenggaranya pemerintahan Nagari yang demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel serta tata kelola pemerintah Nagari yang baik (Good Governance) mengacu pada prinsip-prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip “Clean Government” yaitu pemerintah yang bersih. Terlaksananya Administrasi dan Penatausahaan yang baik serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Terciptanya pelayanan secara profesional yang sama dan adil serta

kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah Nagari secara keseluruhan. Hal demikian merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan Nagari secara cepat dan merata.

Misi 2 Melestarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat : Nagari dalam upaya implementasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Misi melestarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat Nagari dalam upaya implementasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dicapai dengan pengembangan pendidikan non formal di tengah-tengah masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi mesjid dan surau/mushalla. Meningkatkan mutu SDM masyarakat Nagari dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adat, budaya dan agama (syarak) sebagai identitas kembali kesurau akan menumbuhkan masyarakat Nagari yang berintelektualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beradat dan akidah (tauhid) yang kuat. Ini menciptakan kehidupan masyarakat Nagari yang berbudaya, beriman dan bertaqwa dengan sendirinya mempunyai nilai akhlak terpuji. Terbentuknya masyarakat Nagari yang cerdas dan berilmu dengan nilai budaya Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) tidak terlepas dari peranan “urang nan ampek jinih” (Ninik mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai, Urang Mudo,

Bundo Kandung) dan “Tali Tigo Sapilin” (Ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan) dalam Nagari.

Misi 3 Optimalisasi pembangunan sarana prasarana Nagari dalam menunjang mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak.

Misi Optimalisasi pembangunan sarana prasarana Nagari dalam menunjang mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak dicapai dengan mengembangkan produktifitas sektor-sektor riil ekonomi Nagari dan pembangunan sarana prasarana Nagari dalam menunjang aktifitas masyarakat untuk meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat Nagari. Peningkatan SDM dan memberdayakan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi Nagari berbasis agribisnis dan industri rumah tangga sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak.

Misi 4 : Membuka ruang kerjasama dengan masyarakat nagari, lembaga-lembaga

Di nagari, antar nagari dan / atau badan lainnya yang tidak mengikat.

Misi membuka ruang kerjasama bertujuan terhadap peningkatan pengelolaan SDM pemerintahan nagari ataupun masyarakat nagari secara luas dalam

Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang tepat guna dan berdaya

Guna yang ada di nagari amping parak

BAB V

PENUTUP

Program pembangunan nagari pada dasarnya merupakan instrument untuk mewujudkan visi dan misi Wali nagari. Program kerja disusun berdasarkan visi dan misi Wali Nagari serta indicator pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan memperhitungkan gambaran umum, kondisi nagari, strategi pembangunan nagari, arah kebijakan keuangan nagari dan arah kebijakan umum yang telah ditetapkan.

Karena program ini hanya untuk jangka 6 tahun maka untuk menjabatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa jabatan wali nagari, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekedar dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa transisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Nagari Tahun tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun mengikuti jabatan Wali Nagari silih berganti. Demikian Program-program yang kami rencanakan semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program bisa terealisasi sesuai yang disusun dan direncanakan.



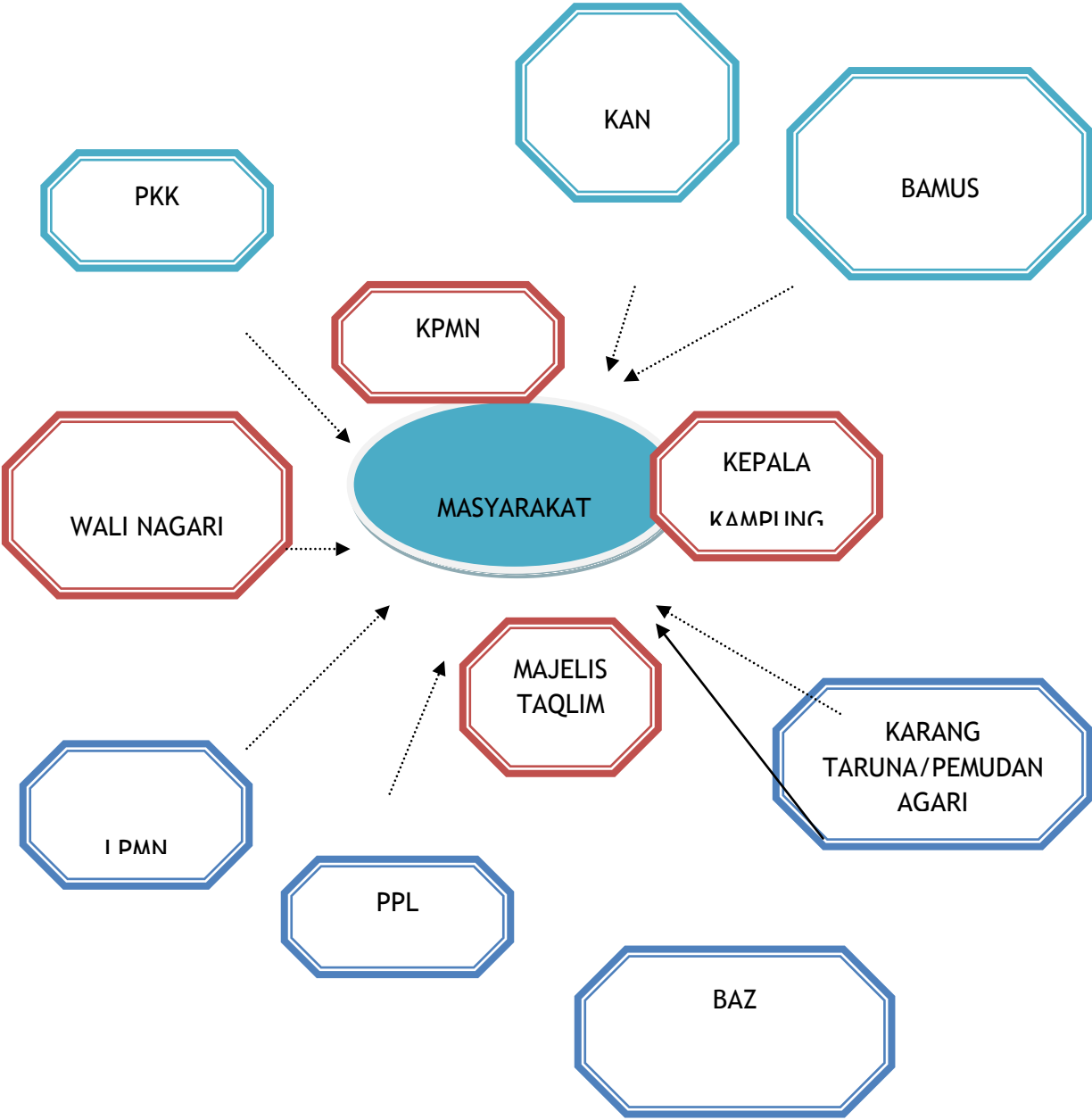
LAMPIRAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**





Lampiran II Digram Venn





Lampiran III Kelender Musim

KEGIATAN/ BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES
A. IKLIM												
▪ ANGIN	☄	☄	☄	☄	☄	—	—	—	☄	☄	☄	☄
▪ HUJAN									⚡	⚡	⚡	⚡
▪ KEMARAU				☀	☀	☀	☀					
B. PENGOLAHAN LAHAN												
▪ TANAM	Δ	Δ	Δ									
▪ PANEN			òó	òó	òó							
▪ PACAKLIK						×	×	×				
▪ HAMA PENYAKIT									Ö	Ö	Ö	Ö
▪ PEMASARAN HASIL PERTANIAN	√	√	√	√	√							
C. TANAMAN PANGAN												
▪ PENGOLAHAN TANAH									◊	◊		
▪ TANAM										▽	▽	
▪ PANEN											😊	😊
D. PERIKANAN												
▪ PANEN										«	«	«
▪ PACEKLIK							×	×	×			





PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

Lampiran IV. Tabel Data Potensi, Masalah dan Pemecahan masalah

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif tindakan pemecahan masalah	Tindakan yang layak
1	2	3	4	5	6
	I. Pendidikan:				
1	Banyaknya Ibu-Ibu yang tidak memiliki skil industri rumah tangga	Tidak adanya Pelatih dan peralatan	Tenaga Ada tempat ada minat ada	Pengadaan Pelatihan industri rumahan	Pengadaan Pelatihan industri rumahan
2	Banyak anak didik butuh Bea Siswa	Keluarga miskin	Lahan ada, Matrial lokal,	Bantuan biaya Pendidikan	Bantuan Beasiswa miskin
3	Belum ada kursus Bordir / Menjahit	Tidak ada Pelatih	Peminat ada, Peralatan tidak ada	Bantuan alat Bordir dan Pelatih	Bantuan alat Bordir
4	Sebagian besar penduduk belum punya keterampilan dan keahlian	Tidak ada pengetahuan	Lahan ada, matrial lokal	Pelatihan Keterampilan	Pelatihan Keterampilan
5	Minat anak mulai berkurang untuk bersekolah, banyak cabut saat jam belajar	Sarana Belajar Kurang Memadai	Lahan ada, batu, Pasir, Semen	Pembangunan	Pembangunan Peralatan dan Sarana Belajar
6	Bidang Kesenian Tradisional maupun modern Kurang Berkembang	Belum ada pelatihan kesenian	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pemb. Gedung Kesenian	Pemb. Gedung Kesenian
7	Masih banyak yang buta huruf	Belum ada program paket	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Program Paket A,B,C	Program Paket A,B,C



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

8	Banyaknya petani yang belum memahami ilmu pertanian yang memadai	Tidak adanya Pelatih dan peralatan	Tenaga Ada tempat ada minat ada	Pengadaan Pelatihan Pembinaan Kelompok tani dan pembuatan bibit unggul	Pengadaan Pelatihan Pembinaan Kelompok tani dan pembuatan bibit unggul
11	Banyaknya remaja / ibu-ibu yang berminat belajar rebana	Tidak adanya Pelatih dan peralatan	Tenaga Ada tempat ada minat ada	Pengadaan Pelatihan Rebana	Pengadaan Pelatihan Rebana
12	Banyak di antara masyarakat yang manganggur	Tidak ada modal dan Pekerjaan tetap	Lahan ada, Matrial lokal,	Pelatihan dan Pemodalan	Pelatihan dan Pemodalan
13	Sebagian besar penduduk belum punya keterampilan dan keahlian	Keluarga miskin	Tenaga Ada	Pelatihan dan Kursus	Pelatihan dan Kursus
14	Minat anak mulai berkurang untuk bersekolah, banyak cabut saat jam belajar	Sarana Belajar Kurang Memadai	Lahan ada, batu, Pasir, Semen	Pembangunan	Pembangunan Peralatan dan Sarana Belajar
16	Belum adanya bangunan MDA	Tidak adanya bangunan	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pengadaan Gedung MDA	Pengadaan Gedung MDA
17	Pelatihan Salon Kecantikan belum ada	Tidak adanya Keahlian	Lahan ada, Tenaga lokal	Pengadaan Pelatihan Salon Kecantikan	Pengadaan Pelatihan Salon Kecantikan
18	Banyaknya kawula muda yang gagap teknologi	Tidak adanya Pelatih dan peralatan	Tenaga Ada tempat ada minat ada	Pengadaan Pelatihan Komputer	Pengadaan Pelatihan Komputer
19	Berkurangnya minat masyarakat akan kelestarian alat musik tradisional dan Kebudayaan	Tidak adanya Pelatih dan peralatan	Tenaga Ada tempat ada minat ada	Pengadaan Pelatihan Alat Musik Tradisional dan kesenian (Talempong, Saluang, Rabab, Randai dll)	Pengadaan Pelatihan Alat Musik Tradisional dan kesenian (Talempong, Saluang, Rabab, Randai dll)
20	Banyaknya masyarakat yang kurang memahami manfaat berolah raga	Tidak adanya Pelatih dan peralatan	Tenaga Ada tempat ada minat ada	Pengadaan Pelatihan Senam Jantung sehat	Pengadaan Pelatihan Senam Jantung sehat



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

21	Banyaknya Perangkat Pemerintahan Nagari dan Masyarakat Kurang mampu yang tidak pandai komputer	Tidak adanya Pelatih dan peralatan	Tenaga Ada tempat ada minat ada	Pengadaan Pelatihan Keterampilan Komputer	Pengadaan Pelatihan Keterampilan Komputer
22	Kurangnya Buku dan Mobiler Perpustakaan nagari		Tenaga Ada Tempat Ada	Pengadaan Meja Rak, Buku	Pengadaan Meja Rak, Buku
	II. Kesehatan				
1	Belum memiliki Bangunan Posyandu dan masih menumpang	Kurang sarana dan prasarana dalam bidang Kesehatan	Lahan ada	Pembangunan gedung Posyandu	Pembangunan gedung Posyandu
2	Belum semua rumah menikmati air bersih	Keluargas Miskin	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Pembuatan Sarana Air Bersih	Pembuatan Sarana Air Bersih
3	Tempat Pembuangan sampah akhir tidak ada	Sampah dibuang ke sungai	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir	Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir
4	Masih banyak KK Miskin yang tidak punya BPJS	Keluarga Miskin	Tenaga ada	Bantuan Pembuatan BPJS	Bantuan Pembuatan BPJS
5	Masih ada ibu balita yang belum membawa anaknya ke Pos yandu	Keluarga Miskin	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Penyuluhan Kesehatan	Penyuluhan Kesehatan
6	Masih ada warga yang belum sadar dan belum menikmati gizi dan vitamin	Keluarga Miskin	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan	Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan
7	Masih banyak KK Miskin yang tidak punya JAMKESMAS	Keluarga Miskin	Tenaga ada	Bantuan Pembuatan JAMKESMAS	Bantuan Pembuatan JAMKESMAS
8	Masih ada ibu balita yang belum membawa anaknya ke Pos yan du	Keluarga Miskin	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Penyuluhan Kesehatan	Penyuluhan Kesehatan



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

9	Masih ada warga yang belum sadar dan belum menikmati gizi dan vitamin	Keluarga Miskin	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan	Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan
10	Belum memiliki Bangunan Pos yandu dan masih menumpang	Kurang sarana dan prasarana dalam bidang Kesehatan	Lahan ada	Pembangunan gedung Posyandu	Pembangunan gedung Posyandu
11	Belum adanya	Keluarga Miskin	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pembuatan Sarana Air Bersih	Pembuatan Sarana Air Bersih
12	Sulitnya mendapatkan ambulan	Keluarga miskin	Tenaga ada	Pengadaan Ambulan Desa	Pengadaan Ambulan Desa
13	Belum adanya Tenaga Medis yang Memadai di Pustu	Kurang Sarana dan Prasarana dalam Bidang Kesehatan	Tenaga Ada	Penambahan Tenaga Medis yang memadai	Penambahan Tenaga kerja
14	Perlunya Diadakan Pelatihan Peningkatan Kader KB	Kader KB	Tenaga ada	Pelatihan Kader KB	Pelatihan Kader KB
15	Belum adanya Pemasangan Implant yang baik	Kader KB	Tenaga ada	Pelatihan pemasangan Implant	Pelatihan pemasangan Implant
16	Belum Maksimalnya pemberdayaan Posandu	Kurangnya Perhatian bidang Kesehatan	Tenaga ada	Pemberdayaan Posyandu	Pemberdayaan Posyandu
	Sarana dan Prasarana				
1		Belum adanya Akses	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Jalan Lingkar Ps. Minggu – Duku Induk	Pengadaan Jalan Lingkar Ps. Minggu – Duku Induk
2		Keluarga miskin	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Rehab Rumah	Pengadaan Rumah Layak Huni



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

3		Tidak ada akses jalan	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pengerasan Jalan	Pencoran Jalan
4		Tidak ada akses jembatan	Masyarakat ada	Pembuatan Jembatan Gantung	Pembuatan Jembatan Gantung
5		Tidak ada akses jalan	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pengerasan Jalan	Pencoran Jalan
6		Keluarga miskin	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Rehab Rumah	Pengadaan Rumah Layak Huni
7		Tidak Terawat	Lahan ada, batu, Pasir, Semen	Perawatan	Perawatan
8		Terkikis Air	Lahan ada, batu, Pasir, Semen	Pemberonjongan	Pemberonjongan
9		Belum adanya Akses	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Jalan Jembatan Gantung, Kampung Melayu, Parak Kubu	Pengadaan Jalan Jembatan Gantung, Kampung Melayu, Parak Kubu
10		Tidak ada akses Jalan	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pengerasan Jalan	Pencoran Jalan
11		Tidak ada akses Jalan	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pengerasan Jalan	Pencoran Jalan
12		Tidak ada akses Jalan	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pengerasan Jalan	Pencoran Jalan
13		Belum adanya Akses	Lahan ada, Material, Tenaga	Melanjutkan Pembangunan Jalan Rimbo Tapuih Duku Induk	Melanjutkan Pembangunan Jalan Rimbo Tapuih Duku Induk



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

16		Belum adanya Besi Pengaman Kantor	Tenaga Pemasang ada	Pengadaan Besi Pengaman Kantor	Pengadaan Besi Pengaman Kantor
17		Belum adanya Parit Miring	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Parit Miring Kp. Melyu	Pengadaan Parit Miring Kp. Melyu
18		Belum adanya Parit Miring	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Parit Miring Jalan ke Taluak Alai	Pengadaan Parit Miring Jalan ke Taluak Alai
19		Belum adanya Parit Miring	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Parit Miring Jalan dekat eler ke Masjid Kp. Melayu	Pengadaan Parit Miring Jalan dekat eler ke Masjid Kp. Melayu
20		Tidak Adanya Perbaikan	Lahan ada, Material, Tenaga	Perbaikan Posko Pemuda	Perbaikan Posko Pemuda
21		Belum adanya Parit Miring dan Gorong-gorong	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Parit Miring Jalan dan Gorong-Gorong	Pengadaan Parit Miring Jalan dan Gorong-Gorong
22		Belum adanya Parit Miring	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Parit Miring Jalan sepanjang Kampung Tanjung	Pengadaan Parit Miring Jalan sepanjang Kampung Tanjung
23		Tidak Adanya Jalan	Lahan ada, Material, Tenaga	Pembukaan Jalan Lingkar Lereng Bukit Pasar Minggu	Pembukaan Jalan Lingkar Lereng Bukit Pasar Minggu
	Lingkungan				
1	Tebing Batang Tarusan terancam longsor , terban	Terkikis Air	Lahan ada, batu, Pasir, Semen	Pemberonjongan	Pemberonjongan



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

2		Tidak terawat	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Perawatan dan Penambahan saluran	Perawatan dan Penambahan saluran
3		Keluarga Miskin	Tenaga, Matrial lokal	Pembangunan Saluran air bersih	Pembangunan Saluran air bersih
4		Keluarga Miskin	Tenaga, Matrial lokal	Pembangunan Saluran air bersih	Pembangunan Saluran air bersih
5		Keluarga Miskin	Tenaga, Matrial lokal	Pembangunan Saluran air bersih	Pembangunan Saluran air bersih
6		Terkikis Air	Lahan ada, batu, Pasir, Semen	Pemberonjongan	Pemberonjongan
7		Terkikis Air	Lahan ada, batu, Pasir, Semen	Pemberonjongan	Pemberonjongan
8		Tidak adanya Pengetahuan warga	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pelatihan	Pelatihan
9		Potensi Wisata dan ekonomi	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Bantuan Bibit Ikan Larangan	Bantuan Bibit Ikan Larangan
	Sosial dan Budaya				
1	Tidak Adanya Pelatihan Budaya Minang Kabau	Tidak ada Perhatian	Tenaga ada	Bantuan dan Pelatihan Keahlian	Bantuan dan Pelatihan Keahlian



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

2		Tidak ada Perhatian	Tenaga ada	Bantuan dan Pelatihan Keahlian	Bantuan dan Pelatihan Keahlian
3		Keluarga Miskin	Tenaga ada	Bantuan Beasiswa	Bantuan Beasiswa
4		Tidak ada Lapangan Kerja	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Pelatihan keahlian dan bantuan modal	Pelatihan keahlian dan bantuan modal
5		Keluarga Miskin	Tenaga ada	Bantuan dan Pelatihan Keahlian	Bantuan dan Pelatihan Keahlian
6		Kurangnya Pengetahuan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Bantuan dan Pelatihan Keahlian	Bantuan dan Pelatihan Keahlian
7		Kurangnya Pembinaan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Remaja	Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Remaja
8		Kurangnya Pengkaderan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Program Pengkaderan	Program Pengkaderan
9		Kurangnya Pembinaan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Program Pengkaderan	Program Pengkaderan
10		Kurangnya Pembinaan	Tenaga,Matrial lokal	Program Baca Tulis AL-Qur'an	Program Baca Tulis AL-Qur'an
11		Kurangnya Pengkaderan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Program Pengkaderan	Program Pengkaderan
12		Kurangnya Pembinaan	Tenaga,Matrial lokal	Program Baca Tulis AL-Qur'an	Program Baca Tulis AL-Qur'an
13		Kurangnya Pembinaan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Remaja	Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Remaja



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

14		Kurangnya Pengkaderan	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Program Pengkaderan	Program Pengkaderan
15		Kurangnya Pembinaan	Tenaga, Matrial lokal	Program PHBI	Program PHBI
16		Kurangnya Pembinaan	Tenaga, Matrial lokal	Program Pendidikan Agama dan Kegiatan pembelajaran	Program Pendidikan Agama dan Kegiatan pembelajaran
17		Honorarium minim	Tenaga ada	Penambahan Honorer	Penambahan Honorer
18		Kurangnya Pembinaan	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Remaja	Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Remaja
19		Kurangnya Pengkaderan	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Program Pengkaderan	Program Pengkaderan
20		Belum adanya pembinaan	Tenaga ada, Lembaga ada	Program Pembinaan Kelembagaan Adat (KAN)	Program Pembinaan Kelembagaan Adat (KAN)
21		Kurangnya pemberdayaan	Tenaga ada, Lembaga ada	Program Pemberdayaan TP-PKK Nagari	Program Pemberdayaan TP-PKK Nagari
22		Kurang maksimal	Tenaga ada, Lembaga ada	Program Bulan Bakti Gotong Royong Setiap Tahun	Program Bulan Bakti Gotong Royong Setiap Tahun
23	Kurangnya kegiatan Majelis Ta'lim	Kurang maksimal	Tenaga ada, Lembaga ada	Peningkatan Kegiatan Majelis Ta'lim	Peningkatan Kegiatan Majelis Ta'lim



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

	Usaha Ekonomi Masyarakat dan Perdagangan				
1	Usaha home industri kurang lancar	Kurangnya Pembinaan	Tenaga, Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan home Industri	Program Pembinaan / Pelatihan home Industri
2	KUD dan Koperasi lain belum ada	Tidak adanya Koperasi	Tenaga, Matrial lokal	Pengadaan Koperasi	Pengadaan Koperasi
3	Pemasaran hasil Usaha kelompok SPP macet	Kurangnya Pembinaan Pemasaran	Tenaga, Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan Pemasaran	Program Pembinaan / Pelatihan Pemasaran
4	Kelompok penerima SPP butuh tambahan modal	Kurangnya Permodalan	Tenaga, Matrial lokal	Tambahan modal	Tambahan modal
5	Tempat usaha gorengan dan makanan ringan tidak tertata	Kurangnya Pembinaan	Tenaga, Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan	Program Pembinaan / Pelatihan
6	Masih ada kelompok Usaha perempuan yang belum mendapat dana SPP	Kurangnya Perhatian	Tempat ada, Tenaga ada	Penambahan Kelompok SPP	Penambahan Kelompok SPP
7	Pedagang warung kurang modal	Kurangnya Permodalan	Tenaga, Matrial lokal	Tambahan modal	Tambahan modal
8	Usaha home industri kurang lancar	Kurangnya Pembinaan	Tenaga, Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan home Industri	Program Pembinaan / Pelatihan home Industri
9	Kel. SPP dan Mikro Butuh Pembinaan	Kurangnya Pembinaan	Tenaga, Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan	Program Pembinaan / Pelatihan
10	Pemasaran hasil Usaha kelompok SPP tidak lancar	Kurangnya Pembinaan Pemasaran	Tenaga, Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan Pemasaran	Program Pembinaan / Pelatihan Pemasaran
11	Kelompok penerima SPP butuh tambahan modal	Kurangnya Permodalan	Tenaga, Matrial lokal	Tambahan modal	Tambahan modal
12	Tempat usaha gorengan dan makanan ringan tidak	Kurangnya Pembinaan	Tenaga, Matrial lokal	Program Pembinaan /	Program Pembinaan /



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

	tertata			Pelatihan	Pelatihan
13	Usaha home industri kurang lancar	Kurangnya Pembinaan	Tenaga,Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan home Industri	Program Pembinaan / Pelatihan home Industri
14	KUD dan Koperasi lainbelum ada	Tidak adanya Koperasi	Tenaga,Matrial lokal	Pengadaan Koperasi	Pengadaan Koperasi
	I. Pertanian				
1	Banyaknya hama dan binatang pengganggu Tanaman	Kurangnya pengetahuan petani dan kurangnya obat-obatan	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan Pertanian dan bantuan obat tanaman	Penyuluhan Pertanian dan bantuan obat tanaman
2	Irigasi tidak berfungsi	Tidak adanya perawatan	Tenaga,Matrial lokal	Bantuan perawatan	Bantuan perawatan
3	Subsidi pupuk tidak mencapai sasaran	Tidak adanya pengkoordinasian	Tenaga,Matrial lokal	Sistem penyaluran yang ideal	Sistem penyaluran yang ideal
4	Kelompok Tani kurang aktif	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Pengaktifan kelompok tani	Pengaktifan kelompok tani
5	Penjualan hasil panen masih rendah/murah	Kurangnya pengetahuan petani	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan dan koperasi penerima hasil tani	Penyuluhan dan koperasi penerima hasil tani
6	Kelompok petani cacao Kurang aktif	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Pengaktifan kelompok tani	Pengaktifan kelompok tani
7	Penanaman tidak serentak	Kurangnya pengetahuan petani	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan	Penyuluhan
8	Bantuan bibit unggul dan berkualitas belum dinikmati oleh sebagian masyarakat petani dan	Kurangnya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Bantuan bibit yang	Bantuan bibit yang



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

	pekebun			merata	merata
9	Pembuatan Bio Gas	Tidak adanya pengetahuan tentang energi alternatif	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan / pelatihan	Penyuluhan / pelatihan
10	Kelompok Perkebunan kurang aktif dan tidak terorganisir	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Pengaktifan kelompok tani	Pengaktifan kelompok tani
11	Bantuan bibit unggul dan berkualitas belum dinikmati oleh sebagian masyarakat petani dan pekebun	Kurangnya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Bantuan bibit yang merata	Bantuan bibit yang merata
12	Hand Tracktor belum dimiliki oleh setiap kelompok tani	Kurangnya prasarana	Tenaga ada	Bantuan hand Tractor	Bantuan hand Tractor
13	Perawatan Cacao, Gambir, dan karet butuh pembinaan dan pelatihan	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan / pelatihan	Penyuluhan / pelatihan
14	Petani Durian, dan buah-buahan belum mendapat pasaran yang memadai	Kurangnya pengetahuan petani	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan dan koperasi penerima hasil tani	Penyuluhan dan koperasi penerima hasil tani
15	Banyaknya hama dan binatang pengganggu Tanaman	Kurangnya pengetahuan petani dan kurangnya obat-obatan	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan Pertanian dan bantuan obat tanaman	Penyuluhan Pertanian dan bantuan obat tanaman
	Peternakan dan Perikanan				



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

1	Bantuan bibit Lele dan ikan nila belum mencapai sasarannya	Kurangnya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Bantuan bibit yang merata	Bantuan bibit yang merata
2	Kelompok Peternak sapi belum ada	Kurangnya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Pembentukan kelompok	Pembentukan kelompok
3	Kelompok Peternak belum terorganisir dan belum mendapatkan bibit unggul	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Bantuan bibit yang merata	Bantuan bibit yang merata
4	Peternak ayam dan bebek masih miskin dan tertinggal	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan	Bantuan bibit
5	Pemilik kolam ikan kurang modal dan bibit unggul	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Bantuan modal	Bantuan modal
6	Peternak ayam dan bebek masih miskin dan tertinggal	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan	Bantuan bibit
7	Kelompok Peternak sapi belum memperoleh bibit unggul	Kurangnya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Pembentukan kelompok	Bantuan Bibit Unggul
8	Kelompok Peternak belum terorganisir dan belum mendapatkan bibit unggul	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Bantuan bibit yang merata	Bantuan bibit yang merata
9	Peternak ayam dan bebek masih miskin dan tertinggal	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan	Bantuan bibit
10	Pemilik kolam ikan kurang modal dan bibit unggul	Kurangnya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Bantuan bibit yang merata	Bantuan bibit yang merata
	Pemerintahan Nagari				
01	Kesejahteraan Perangkat Pemerintahan Nagari	Honor dibawah UMR	Honor Ada Kegiatan	Pembayaran Honorarium dan	Pembayaran Honorarium dan



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

	Masih Minim		Ada	Peningkatan Kinerja	Peningkatan Kinerja
02	Pelayanan Pemerintahan Nagari Kurang Optimal	Pelayanan Kurang Optimal	Operasional ada	Pemaksimalan Operasional	Pemaksimalan Operasional
03	Prasarana Kantor Wali Nagari masih kurang	Kurangnya Prasarana	Belanja Modal ada	Pemaksimalan belanja modal	Pemaksimalan belanja modal
04	Musbang Perlu dilaksanakan	Peralihan Musrenbang ke musbang	Masyarakat, tempat ada	Pelaksanaan Musbang	Pelaksanaan Musbang
05	Profil Nagari Online belum ada	Belum adanya pengentrian data	Tenaga ada	Pelaksanaan Pengentrian data Profil Nagari	Pelaksanaan Pengentrian data Profil Nagari

Wali Nagari Duku Utara

Ketua LPMN

WIDOYO HERMATO

WIRMON YENDRI



**Lampiran 3. Matrik Keterkaitan Misi, Kebijakan, Sasaran Indicator,
Program dan Kegiatan RPJM Nagari
Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau Visi juga dapat diartikan gambaran perwujudan masa depan yang diinginkan, yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Nagari dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari.

Penetapan visi pembangunan Nagari, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Nagari, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Nagari mencapai kondisi yang yang diharapkan.

- Visi Pembangunan Nagari Amping Parak Jangka Menengah Tahun 2017-2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA NAGARI AMPING PARAK
BERBUDAYA ISLAMI, SEJAHTERA dan MANDIRI”**

- Pengertian dari Visi Yaitu :

Berbudaya Islami : Menciptakan suatu kondisi masyarakat yang senantiasa berpegang teguh pada keyakinan beragama. Karena di Nagari Amping Parak semua penduduknya beragama Islam maka sangat diharapkan semua tindakan yang dilakukan senantiasa berpedoman pada Al-Quran dan sunnah Rosul Sholallahu ‘alaihi Wasalam serta melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai adat, budaya dan agama (Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Khitabbullah) dalam setiap sendi kehidupan. Sehingga akan terciptanya masyarakat yang mempunyai solidaritas dan kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya.

Sejahtera : Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dengan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Nagari



yang berbasis pada potensi Nagari Amping Parak yang berdaya jual dan berdaya saing.

:

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi atau MISI adalah kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan diatas dapat tercapai dengan memperhatikan kondisi objektif Nagari.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Nagari, maka misi pembangunan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Jangka Menengah Tahun 2017-2023 dirumuskan sebagai berikut :

Misi 1 : Membangun pemerintahan Nagari yang profesional, efisien, efektif dan bertanggung jawab.

Misi membangun pemerintahan Nagari yang profesional, efisien, efektif dan bertanggung jawab dicapai melalui perwujudan sistem pemerintahan Nagari yang baik dan meningkatnya kemampuan serta Kualitas Kinerja pemerintahan Nagari. Terselenggaranya pemerintahan Nagari yang demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel serta tata kelola pemerintah Nagari yang baik (Good Governance) mengacu pada prinsip-prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip “Clean Government” yaitu pemerintah yang bersih. Terlaksananya Administrasi dan Penatausahaan yang baik serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Terciptanya pelayanan secara profesional yang sama dan adil serta kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah Nagari secara keseluruhan. Hal demikian merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan Nagari secara cepat dan merata.

Misi 2 : Melestarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat Nagari dalam upaya implementasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Misi melestarikan dan memajukan adat, tradisi serta



budaya masyarakat Nagari dalam upaya implementasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dicapai dengan pengembangan pendidikan non formal di tengah-tengah masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi mesjid dan surau/mushalla. Meningkatkan mutu SDM masyarakat Nagari dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adat, budaya dan agama (syarak) sebagai identitas kembali kesurau akan menumbuhkan masyarakat Nagari yang berintelektualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beradat dan akidah (tauhid) yang kuat. Ini menciptakan kehidupan masyarakat Nagari yang berbudaya, beriman dan bertaqwa dengan sendirinya mempunyai nilai akhlak terpuji. Terbentuknya masyarakat Nagari yang cerdas dan berilmu dengan nilai budaya Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) tidak terlepas dari peranan “urang nan ampek jinih” (Ninik mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai, Urang Mudo, Bundo Kandung) dan “Tali Tigo Sapilin” (Ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan) dalam Nagari.

Misi 3 : Optimalisasi pembangunan sarana prasarana Nagari dalam menunjang mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak.

Misi Optimalisasi pembangunan sarana prasarana Nagari dalam menunjang mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak dicapai dengan mengembangkan produktifitas sektor-sektor rill ekonomi Nagari dan pembangunan sarana prasarana Nagari dalam menunjang aktifitas masyarakat untuk meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat Nagari. Peningkatan SDM dan memberdayakan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi Nagari berbasis agribisnis dan industri rumah tangga sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak.



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada MISI 1.

VISI : *"Mewujudkan Masyarakat Nagari yang sejahtera, adil dan makmur, beriman ,bertaqwa dengan menjunjung tinggi azaz*

gotong royong "

MISI 1 : Menciptakan suatu kelembagaan pemerintahan yang mengacu kepada prinsip prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip " Clean Government" .

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintah nagari yang baik (Good Governance) mengacu pada prinsip-prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip "Clean Government" yaitu pemerintah yang bersih.	Terselenggaranya pemerintahan nagari yang demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel.	Pengoptimalisasikan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan nagari melalui peningkatan kualitas SDM dan Sarana.	Mengoptimalkan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan nagari melalui Keterampilan, pelatihan dan pembinaan serta melengkapi sarana.
			Pengoptimalisasikan Tugas, Wewenang serta fungsi Struktural Pemerintahan nagari	Meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi serta kewajiban perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintah nagari.
				Meningkatkan pemahaman kedudukan,



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

				fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari
				Meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi serta kewajiban lembaga kemasyarakatan antara lain LPM, PKK, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya sebagai mitra pemerintah nagari dalam memberdayakan masyarakat.
		Terciptanya keharmonisan hubungan kerja pemerintah nagari, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuka Masyarakat serta Instansi/Lembaga lainnya.	Peningkatan hubungan kerja yang baik dan harmonis pemerintah desa, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuka Masyarakat serta Instansi/Lembaga lainnya.	Menciptakan keharmonisan hubungan kerja pemerintah desa, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuka Masyarakat serta Instansi/Lembaga lainnya.
		Terciptanya Kerangka Aturan, Mantapnya Kelembagaan dan Keuangan serta Standarisasi, Kriteria, Norma dan Prosedur.	Peningkatan koordinasi dan komunikasi pemerintah nagari bersama BPD dan lembaga nagari lainnya dalam merumuskan kebijakan-	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi pemerintah nagari bersama BPD dan lembaga nagari lainnya dalam merumuskan kebijakan-



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

			kebijakan jalannya roda pemerintahan nagari	kebijakan jalannya roda pemerintahan nagari
		Terlaksananya Administrasi dan Penatausahaan yang baik serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan.	Peningkatan kemampuan dan tata kelola serta Kualitas Kinerja pemerintah nagari yang profesional serta disiplin pemerintah nagari.	Meningkatkan kemampuan dan tata kelola serta Kualitas Kinerja pemerintah nagari yang profesional serta disiplin pemerintah nagari
				Melengkapi sarana-prasarana Kantor nagari sebagai penunjang kinerja pemerintah nagari
2.	Mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat nagari	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di pemerintahan nagari	Pemantapan tata kelola pemerintahan nagari, baik administrasi secara keseluruhan maupun pelayanan umum masyarakat nagari serta menertibkan administrasi kependudukan secara optimal.	Pemantapan tata kelola pemerintahan nagari, baik administrasi secara keseluruhan maupun pelayanan umum masyarakat nagari serta menertibkan administrasi kependudukan secara optimal.
				Meningkatkan pelayanan Administrasi secara umum sesuai kebutuhan masyarakat nagari.
				Menyempurnakan data administrasi



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

				kependudukan.
		Terwujudnya administrasi kependudukan tertib secara sempurna.	Melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat nagari atas perlunya memiliki administrasi kependudukan seperti Akta Nikah, Akta Kelahiran, KK dan KTP serta identitas diri lainnya	Meningkatkan Animo masyarakat akan kebutuhan administrasi kependudukan dan identitas diri lainnya.
		Terciptanya pelayanan secara profesional yang sama dan adil serta kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah nagari secara keseluruhan.	Memberikan pelayanan secara profesional yang sama dan adil serta kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah nagari secara keseluruhan.	Meningkatkan pelayanan secara profesional yang sama dan adil dalam upaya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah desa secara keseluruhan.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada MISI 2.

***VISI : Mewujudkan Masyarakat Nagari yang sejahtera, adil dan makmur, beriman ,bertaqwa dengan menjunjung tinggi
azaz gotong royong “***



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

MISI 2 : Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan masyarakat nagari yang demokrasi dan agamis.				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Menumbuhkan masyarakat nagari yang berintelektualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beradat dan akidah (tauhid) yang kuat.	Terbentuknya masyarakat nagari yang cerdas dan berilmu dengan nilai budaya Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).	Peningkatan mutu SDM masyarakat nagari dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adat, budaya dan agama (syarak) sebagai identitas kembali kesurau.	Meningkatkan mutu kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai.
				Pengembangan pendidikan non formal di tengah masyarakat.
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.	Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana belajarpendidikan non formal.
				Optimalisasi fungsi mesjid dan surau/mushalla.
2.	Menciptakan kehidupan masyarakat nagari yang berbudaya, beriman dan bertaqwa.	Terciptanya masyarakat nagari yang maju dan berbudaya serta mempunyai nilai akhlak terpuji.	Peningkatan kinerja dan peranan “urang nan ampek jinih” (Ninik mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai, Urang Mudo, Bundo	Meningkatkan kinerja dan peran Pemuka Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta pemerintahan dan



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

			Kandung) dan “Tali Tigo Sapilin” (Ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan) dalam nagari	lembaga desa dalam pembinaan mental dan pemberdayaan masyarakat nagari
			Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adatistiadat, budaya dan agama.	Mendalami pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan adat istiadat. Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat.
3.	Menciptakan rasa aman, tenang dalam suasana kehidupan nagari yang demokratis dan agamis.	Terciptanya rasa aman, tenang dalam suasana kehidupan nagari yang demokratis dan agamis.	Peningkatan pemahaman dan pengamalan atas ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan dalam upaya ketenteraman masyarakat nagari	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan atas ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan dalam upaya ketenteraman masyarakat nagari
		Terciptanya masyarakat nagari memiliki solidaritas dan Moralitas yang tinggi serta kehidupan masyarakat nagari dalam keseimbangan antara hidup rohani dan jasmani.	Pengembangan Kegiatan majelis taklim, wirid-wirid pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya serta menggiatkan masyarakat nagari dalam pengembangan olah raga.	Menciptakan budaya saling menghormati. Meningkatkan hubungan silaturahmi sesama masyarakat nagari baik secara individu maupun kelompok.
				Meningkatkan peran masyarakat nagari dalam



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

				pengembangan kegiatan keagamaan dan olah raga.



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada MISI 3.

VISI : Mewujudkan Masyarakat Nagari yang sejahtera, adil dan makmur, beriman ,bertaqwa dengan menjunjung tinggi
azaz gotong royong “

MISI 3 : Meningkatkan sumber- sumber pendanaan pemerintah pembangunan Nagari.untuk optimalisasi pembangunan sarana prasarana nagari untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan produktifitas sektor-sektor rill ekonomi nagari.	Berkembangnya produktifitas sektor-sektor rill ekonomi nagari. dalam meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat nagari.	Peningkatan SDM masyarakat nagari. dalam berwiraswasta, bertani, berternak dan sektor lainnya yang bersifat ekonomis.	Meningkatkan pengelolaan dan manajemen kelompok maupun perorangan.
				Meningkatkan pengelolaan dan manajemen kelompok maupun perorangan.
2.	Meningkatkan kapasitas sarana prasarana dan infrastruktur nagari.	Meningkatnya kapasitas sarana prasarana berpotensi ekonomis dan insfrastruktur nagari. dalam menunjang aktifitas masyarakat nagari.	Pembangunan sarana prasarana berpotensi ekonomis dan insfrastruktur nagari. dalam menunjang aktifitas masyarakat nagari.	Menyediakan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat nagari.
				Meningkatkan pengelolaan dan



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

				pemeliharaan sarana prasarana dan infrastruktur oleh masyarakat nagari. untuk peningkatan kualitas lingkungan.



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)
NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMNagari)

TAHUN 2017 - 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAK

- Menimbang** :a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat nagari melalui pembangunan dalam skala nagari;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap wali nagari dan perangkat, operasional Pemerintah nagari, tunjangan operasional Bamus, Intensif RT/RW, pembangunan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, penyelenggara pemerintah nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Duku Utara Tahun 2017-2023.
- d. Bahwa sebelum peraturan nagari sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh wali Nagari maka perlu dibahas dan disepakati RPJMNagari 2017-2023 antara wali nagari dan Bamus sesuai

dengan berita acara musyawarah nagari penyusunan RPJM-Nagari 2017-2023

- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bamus.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMNagari) TAHUN 2017 – 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMNagari) TAHUN 2017-2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Amping Parak

Pada Tanggal : _____ 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN

NAGARI (BAMUS)

NAGARI AMPING PARAK

KETUA

IRWAN DESRI NALDI

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS

Nomor : 140/ 20/ AP/V-2017

Nomor : 10/BAMUS-AP/ V- 2017

KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS

NAGARI AMPING PARAK

TENTANG

PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJMNagari) TAHUN 2017-2023

Pada hari ini Senin tanggal Lima belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. YUSMARDI : Wali Nagari Amping Parak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. IRWAN DESRI NALDI : Ketua / Wakil Ketua / Anggota Bamus Nagari Amping Parak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Amping Parak selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJMNagari 2017-2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik _penyesuaian dan perubahan RPJMNagari 2017-2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Nagari 2017-2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kecamatan Sutera untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(YUSMARDI)

(IRWAN DESRI NALDI)

BERITA ACARA MUSYAWARAH NAGARI

PEMBAHASAN BAMUS TERHADAP RPJMNagari 2017-2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Wali Nagari Amping Parak , Kecamatan Sutera dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Nagari, Wali Nagari dan perangkat Nagari serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari tahun 2017 – 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RPJMDesa 2017-2023 dengan rincian sebagai berikut

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan

b. Bidang Pembangunan

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. jalan pemukiman;
 2. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 3. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 4. infrastruktur Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu;
3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya
5. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kandang ternak;
 11. instalasi biogas;
 12. mesin pakan ternak;
6. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. penghijauan;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
- pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan,
4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda;dan

B. Menyepakati RPJMNagari 2017-2023 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2017-2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3. Dst

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Nagari ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)

NAGARI AMPING PARAK

1. Ketua / Anggota : (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : (.....)
3. Sekretaris / Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)
6. Dst : (.....)

DAFTAR HADIR PERANGKAT NAGARI DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RPJMNagari 2017-2023
NAGARI : AMPING PARAK
KECAMATAN : SUTERA
TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.		Wali Nagari	
2.		Sekretaris Nagari	
3.		Kasi Pemerintahan	
4.		Kasi Kesra Dan Pelayanan	
5.		Kaur Perencanaan dan Keuangan	
6.		Kaur Penatausahaan	
7.		Bendahara Nagari	
8.		Ketua LPMN	
9.		Anggota LPMN	
10.		Ketua PKK.	

11.		Ketua Pemuda	
12.		Kepala Kampung	
13.		Kepala Kampung	
14.		Kepala Kampung	
15.		Kepala Kampung	
16.		Kepala Kampung	
17.		Kepala Kampung	

Bamus Nagari Amping Parak

Sekretaris,

(SALMAN MT)



**WALI NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI AMPING PARAK
NOMOR TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari)
TAHUN 2017-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AMPING PARAK

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Wali Nagari
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintah Nagari, tunjangan operasional Bamus, Intensif RT/RW, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAK

dan

WALI NAGARI AMPING PARAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-
Nagari) TAHUN 2017-2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan Bamus adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Nagari adalah Wali nagari dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari;
11. Peraturan nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh wali nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Rencana Pembangunan Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI 2017-2023

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Nagari disusun oleh Pemerintahan Nagari;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
3. Rancangan RPJM-Nagari yang berasal dari Pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan rancangan RPJM Nagari kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Nagari penyusunan RPJM Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari menjadi dokumen RPJM Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari;
5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi :

***“TERWUJUDNYA NAGARI AMPING PARAK YANG “ SEJAHTERA, MANDIRI
DAN BERBUDAYA ISLAMI “***

Pasal 5

Misi :

1. Tercapainya kesejahteraan lahir batin
2. Adanya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Nagari
3. Keimanan dan ketaqwaan yang kuat sebagai pegangan hidup masyarakat
4. Memupuk rasa gotong royong dan kebersamaan sebagai sendi dasar kehidupan bermasyarakat di Nagari
5. Mampu menjaga kelestarian sumber daya alam nagari dengan dikelola dan dikembangkan untuk kemajuan Nagari
6. Terselenggaranya pemerintahan nagari yang efisien, efektif dan bersih dengan mengutamakan masyarakat
7. Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan Nagari
8. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan Pembangunan Nagari
9. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia dalam pembangunan Nagari yang berkelanjutan
10. Mengembangkan perekonomian Nagari
11. Menciptakan rasa aman , tentram, dalam suasana kehidupan nagari yang demokratis dan agamis.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik dan bersih (good govermence dan clean govermence)
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan nagari.
3. Meningkatkan sumber- sumber pendanaan pembangunan nagari.
4. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan nagari dan administrasi nagari.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset / kekayaan nagari.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan umum
7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat
8. Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat,
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kewaspadaan terhadap bencana alam
10. Meningkatkan kualitas lingkungan.
11. Menfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat nagari.
12. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan.
13. Meningkatkan kenyamanan menjalankan ibadah
14. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda.
15. Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi pedesaan.
16. Meningkatkan budaya disiplin dalam masyarakat
17. Meningkatkan ketaatan terhadap hukum peraturan
18. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber daya termasuk komunikasi.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Nagari dan Bamus dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat Nagari;
2. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
3. Tunjangan operasional Bamus;
4. Program operasional Pemerintahan Nagari;
5. Program Pelayanan Dasar;
6. Program pelayanan dasar infrastruktur;
7. Program kebutuhan primer pangan;
8. Program pelayanan dasar pendidikan;
9. Program pelayanan kesehatan;
10. Program kebutuhan primer Sandang;
11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
12. Program Ekonomi produktif;
13. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari;
14. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
15. Program dana bergulir.
16. Program Pemberdayaan Masyarakat
17. Program Pembinaan Masyarakat

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM- Nagari ini akan diatur oleh Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

1. Peraturan Nagari tentang RPJM- Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari

Ditetapkan di : Amping Parak
Pada tanggal :
2017

WALI NAGARI AMPING PARAK



YUSMARDI

Diundangkan di Nagari Amping parak
Pada tanggal
Sekretaris Nagari

YENDRI

Lembaran Nagari Amping parak Tahun.2017 Nomor 4

Lampiran V : Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2023

PENYUSUNAN RPJM DESA TAHUN 2017-2023																				
NAGARI		: AMPING PARAK																		
KECAMATAN		: SUTERA																		
KABUPATEN		: PESISIR SELATAN																		
PROVINSI		: SUMATERA BARAT																		
No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakira an Volume	Satuan	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6	Th 7	Jlh (Rp)	Sumber	Swak elola	Kerjasam a Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
1	Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	a	Sosial Dan Budaya	Pelatihan perangkat nagari	Nag.Amp.Parak	7	Paket	Wali/Perangkat	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	ADD			
			Sosial Dan Budaya	Pelatihan kelembagaan nagari	Nag.Amp.Parak	7	Paket	Kelembagaan Nagari	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	ADD			
			Sosial Dan Budaya	Penambahan Mobiler Kantor Wali nagari	Nag.Amp.Parak	7	Paket	Wali/Perangkat	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	ADD			
			Ekonomi	Peningkatan Kesejahteraan Aperatur Pemerintahan Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Wali/Perangkat	√	√	√	√	√	√	√	700,000,000	ADD			
			Sosial Dan Budaya	Jaminan Kesehatan,Keselamatan Kerja dan Kematian	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Wali/Perangkat	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	ADD			
			Ekonomi	Jaminan Hari Tua, dan Pensiun	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Wali/Perangkat	√	√	√	√	√	√	√	700,000,000	APBD/APBN			
			Sosial Dan Budaya	Pemeliharaan Gedung/Kantor Wali	Nag.Amp.Parak	4	Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	70,541,000	ADD			
			Sosial Dan Budaya	Rehap Gedung/Kantor Wali	Nag.Amp.Parak	4	Unit	Nagari	√	√	√	√	√	√	√	90,541,000	ADD			
			Sosial Dan Budaya	Operasional Raskin	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,441,000	ADD			
			Sosial Dan Budaya	Operasional Pemungutan PBB-P2	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Kolektor	√	√	√	√	√	√	√	90,133,000	ADD			
			Sosial Dan Budaya	Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari/Bamus	Nag.Amp.Parak	2	Nagari	Nagari							√	60,731,000	ADD			
			Sosial Dan Budaya	Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Nagari	√	√	√	√	√	√	√	45,000,000	ADD			
			Ekonomi	Perencanaan Pembangunan Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Nagari	√	√	√	√	√	√	√	201,680,000	DD			
			Sosial dan Budaya	Musrembang Nagari	Nag.Amp.Parak	3	Paket	Nagari	√	√	√					60,000,000	ADD			
			Sosial Dan Budaya	Pembuatan Profil Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Nagari			√					40,000,000	ADD			
			Sosial Dan Budaya	Kegiatan PHBN	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Nagari	√	√	√	√	√	√	√	45,000,000	DD			
			Sosial Dan Budaya	Kegiatan PHBI	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Nagari	√	√	√	√	√	√	√	105,000,000	DD			
			Ekonomi	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali dan Perangkat	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Perangkat	√	√	√	√	√	√	√	2,356,532,000	ADD			
			Ekonomi	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Gedung/Kantor Wali	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Nagari	√	√	√	√	√	√	√	65,517,000	ADD			
			Sosial Dan Budaya	Partisipasi lomba Anak nagari	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Nagari		√		√		√		75,423,300	ADD			
			Sosial Dan Budaya	Operasional Kantor Wali Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	210,000,000	ADD			
			Sosial Dan Budaya	Operasional Bamus	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Lembaga	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	ADD			
Jumlah Per Bidang 1															5,286,539,300					
	b.	SAPRAS	Pembukaan Jalan Baru	Nag.Amp.Parak	14000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	2,400,000,000	DD			
		SAPRAS	Peningkatan Jalan	Nag.Amp.Parak	16000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	3,000,000,000	DD			
		SAPRAS	Peningkatan Jln. Usaha Tani	Nag.Amp.Parak	10000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000,000	DD			
		SAPRAS	Pemb.Parit Miring	Nag.Amp.Parak	11000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	11,000,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Pemb.Drainase	Nag.Amp.Parak	16000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	11,000,000,000	DD			
		SAPRAS	Perehapan Polindes	Nag.Amp.Parak	6	Unit	Masyarakat				√					400,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Pemb.Sumur Bor (Irigasi Lahan Pertanian)	Nag.Amp.Parak	100	Unit	Masyarakat	√								2,000,000,000	APBN			
		SAPRAS	Pembangunan Mushalla	Nag.Amp.Parak	1	Unit	Masyarakat					√				200,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Pengaspalan Jalan	Nag.Amp.Parak	5000	M	Masyarakat						√			5,000,000,000	APBN			
		SAPRAS	Peningkatan/Perehapan Gedung Salter	Nag.Amp.Parak	1	Unit	Masyarakat	√								500,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Pemb. Jembatan gantung	Nag.Amp.Parak	3	Unit	Masyarakat			√						300,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Pemb. Gedung TK/MDA/TPSA	Nag.Amp.Parak	7	Unit	Pelajar						√			1,000,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Pemb/Rehap WC, dan Sanitasi	Nag.Amp.Parak	12	Unit	Masyarakat					√				100,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembangunan HALTE	Nag.Amp.Parak	1	Unit	Masyarakat					√				20,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembuatan Posko Pemuda	Nag.Amp.Parak	1	Unit	Masyarakat			√						50,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembuatan Pondok Kelompok Nelayan	Nag.Amp.Parak	1	Unit	Masyarakat			√						50,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembuatan Pondok Kelompok Tani	Nag.Amp.Parak	1	Unit	Masyarakat					√				40,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembuatan Plank Merk Sekolah	Nag.Amp.Parak	10	Unit	Masyarakat									10,000,000	DD			
		SAPRAS	RTLH	Nag.Amp.Parak	50	Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	DD			
		SAPRAS	Pemb. Polongan Rumah Penduduk Yang Tersumbat	Nag.Amp.Parak	5	Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembuatan Jalan Usaha Tani	Nag.Amp.Parak	4000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	8,000,000,000	DD			
		SAPRAS	Peningkatan Jalan PNPB	Nag.Amp.Parak	4000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	3,000,000,000	DD			
		SAPRAS	Pemb. Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masy. Tdk Mampu	Nag.Amp.Parak	60	Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	900,000,000	DD			
		SAPRAS	Pemb.Gedung Pokesri, Pagar dan MCK	Nag.Amp.Parak	3	Unit	Masyarakat			√		√		√		500,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Pemb.MCK untuk Masyarakat Tidak Mampu	Nag.Amp.Parak	40	Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembuatan /Peningkatan Irigasi dan Pagar	Nag.Amp.Parak	6	Unit	Masyarakat		√							800,000,000	APBD Kab			

2	Pembangunan Desa	SAPRAS	Pemb.gedung Sekolah (SD,SMP/PESANTREN,SMA)	Nag.Amp.Parak	6	Paket	Pelajar	√	√	√	√	√	√	√	√	6,000,000,000	APBD Kab				
		SAPRAS	Peningkatan Jalan Kebun Sawit	Nag.Amp.Parak	7000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7,000,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembangunan Poskamling Untuk Kamtibmas	Nag.Amp.Parak	3	Unit	Masyarakat								√	√	150,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembuatan Lapangan Bola Kaki	Nag.Amp.Parak	1	Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,500,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembuatan / Peningkatan Jembatan	Nag.Amp.Parak	3000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	900,000,000	DD			
		SAPRAS	Pengadaan Lampu Tenaga Surya di Sepanjang Pantai	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Masyarakat								√	√	150,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembuatan Lapangan Bulu Tangkis dan Futsal	Nag.Amp.Parak	1	Unit	Masyarakat								√	√	1,500,000,000	DD			
		SAPRAS	Pemasangan Batu Jeti	Nag.Amp.Parak	1500	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000,000	APBN			
		SAPRAS	Pemb Parit Miring Jalan Nelayan	Nag.Amp.Parak	4000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,750,000,000	DD			
		SAPRAS	Peningkatan Jalan Krekel Menjadi Jalan Aspal	Nag.Amp.Parak	5000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5,500,000,000	DD			
		SAPRAS	Penambahan APE Luar dan Dalam	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Anak Usia Dini				√	√	√	√	√	√	600,000,000	DD			
		SAPRAS	Bantuan Mobiler Sekolah	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Masyarakat				√	√	√	√	√	√	900,000,000	DD			
		SAPRAS	Pelurusan Sungai	Nag.Amp.Parak	5000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10,500,000,000	APBD/APBN			
		SAPRAS	Sambungan Saluran Irigasi Batang Surantih	Nag.Amp.Parak	5000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10,500,000,000	APBD/APBN			
		SAPRAS	Pemb. Jalan Lingkar	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2,000,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Peingkatan Jalan Evakuasi Tsunami	Nag.Amp.Parak	6000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9,000,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Pemb.Gedung Posyandu	Nag.Amp.Parak	1	Unit	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembuatan Pabrik Pengolahan Sawit	Nag.Amp.Parak	1	Unit	Masyarakat					√	√	√	√	√	500,000,000	APBN			
		SAPRAS	Pembuatan Embung	Nag.Amp.Parak	2	Unit	Masyarakat				√	√	√	√	√	√	300,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Pembuatan Taman PKK	Nag.Amp.Parak	1	Unit	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembuatan VAVIN BLOK	Nag.Amp.Parak	6000	M	Anak sekolah						√	√	√	√	100,000,000	DD			
		SAPRAS	Pemasangan Jaringan Listrik Baru	Nag.Amp.Parak	7	KM	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Pemb.Pagar Sekolah (TK,SD,SMP,SMA)	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Masyarakat				√	√	√	√	√	√	100,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembuatan Jln. Rabat Beton	Nag.Amp.Parak	6000	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	150,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembuatan Tambatan Perahu	Nag.Amp.Parak	3	Paket	Masyarakat				√	√	√	√	√	√	300,000,000	DD			
		SAPRAS	Eko Wisata, Konservasi Penyui & Vegetasi Pantai	Nag.Amp.Parak	3	Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	40,000,000	APBD/APBN			
		SAPRAS	Pemb Tempat Parkir Sekolah	Nag.Amp.Parak	10	Paket	Pelajar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,500,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Perehapan Kantor Gedung KAN	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat Adat		√	√	√	√	√	√	√	√	150,000,000	ADD			
		SAPRAS	Pengadaan mobiler TPA/TPSA	Nag.Amp.Parak	10	Paket	Pelajar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Pembangunan Gedung BUMNAG	Nag.Amp.Parak	1	Unit	Masyarakat Adat				√	√	√	√	√	√	1,000,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Pembukaan Padang Gembala dan Pembatasnya	Nag.Amp.Parak	1	Unit	Masyarakat Adat		√	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Perbaikan Pagar Sekolah	Nag.Amp.Parak	10	Paket	Pelajar					√	√	√	√	√	75,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Pembangunan Tempat Pemasaran Hasil Karya Masyarakat	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	75,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Pembangunan Sanggar Anak Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Masyarakat					√	√	√	√	√	1,000,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Rehap Gedung Pukesri dan Gedung TK	Nag.Amp.Parak	6	Paket	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	1,200,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembentukan & Modal BUMNag. Amping Parak	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	700,000,000	DD			
		SAPRAS	Pembangunan/ Rehabilitas Pasar Tradisional	Nag.Amp.Parak	2	Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,500,000,000	APBD Kab			
		SAPRAS	Bantuan/Pembangunan Perumahan Nelayan	Nag.Amp.Parak	60	Paket	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	24,000,000,000	APBN			
		SAPRAS	Kelanjutan Pemb.Gedung dan Pagar Kantor Wali	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	ADD			
Jumlah Per Bidang 2																189,746,539,300					
		c. Sosial dan Budaya	Pembinaan Kemasyarakatan	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	DD				
		Sosial dan Budaya	Pembinaan Tramtib LINMAS Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	DD			
		Ekonomi	Peningkatan Kesejahteraan Imam, Khatib dan Gharin	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	ADD			
		Sosial dan Budaya	Pembinaan Dan Pelatihan SIBAT PMI	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	APBD Kab			
		Sosial dan Budaya	Pening.Kesejahteraan Kader dan Tenaga Sukarela	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	140,000,000	ADD			
		Ekonomi	Sosialisasi/Pertemuan Kader kader Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	ADD			
		Ekonomi	Pembiayaan Operasional Kader Nagari	Nag.Amp.Parak	6	Masy.	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35,000,000	ADD			
		Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Siskamling	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	ADD			
		Sosial dan Budaya	Pembinaan Keagamaan Pemuda dan Pemudi	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	ADD			
		Sosial Dan Budaya	Pelatihan Kesenian Budaya Anak Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	ADD			
		Ekonomi	Pembinaan Pemuda dan Karang Taruna	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Pemuda/i	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	ADD			
		Sosial Dan Budaya	Pelatihan Organisasi Pemuda	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	ADD			
		Sosial Dan Budaya	Pelatihan Ibu Ibu Hamil	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	90,000,000	DD			
		Sosial Dan Budaya	Penamb. Kartu BPJS d Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,200,000,000	APBD Prov			
		Ekonomi	Pelatihan dan Study Banding Kelompok Tani	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat							√	√	√	150,000,000	DD			
		Sosial Dan Budaya	Pengadaan Alat Perlengkapan Posyandu/Kesehatan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat								√	√	140,000,000	DD			
		Ekonomi	Pelatihan Pengawetan Ikan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat								√	√	20,000,000	DD			
		Sosial dan Budaya	Pengadaan Alat-Alat DRUM BAND	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat					√	√	√	√	√	100,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Pengadaan Bantuan Hentraktor	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	300,000,000	DD			
		Ekonomi	Pengadaan Bantuan Rumah Kompos	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	1,000,000,000	APBD Prov			
		Ekonomi	Lumbung Pangan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat			√	√	√	√	√	√	√	1,500,000,000	DD			

3	Pemberdayaan	Ekonomi	Penambahan Tanaman Magrof dan Cemara Pantai	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	1,250,000,000	DD					
		Ekonomi	Pelatihan Anak2 Mengaji	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	DD				
		Sosial Dan Budaya	Pengadaan Alat2 Musik Tradisional Randai	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	DD				
		Ekonomi	Pembinaan Kader Nagari Penggerak Peternakan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	150,000,000	DD				
		Ekonomi	Penambahan Jamkesda	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3,000,000,000	APBD Prov				
		Sosial Dan Budaya	Pelatihan/Peningkatan Guru2 MDA/ Guru TK PAUD	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90,000,000	DD				
		Ekonomi	Pelatihan Dan Pengembangan Pembuatan Bio Gas	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	75,000,000	DD				
		Ekonomi	Pelatihan Kader Kader Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90,000,000	DD				
		Ekonomi	Pelatihan Imam Khatib dan Garin	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	400,000,000	DD				
		Ekonomi	Pelatihan Majelis Taklim	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	DD				
		Ekonomi	Kesejahteraan UKK Nelayan,UKK Tani	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35,000,000	DD				
		Ekonomi	Pembinaan PKK	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	DD				
		Ekonomi	Study Banding Ibu PKK	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000					
		Sosial Dan Budaya	Koperasi	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,500,000,000	APBD Kab				
		Sosial Dan Budaya	Pelatihan Penyelenggaraan Jenasah	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	DD				
		Ekonomi	Pelatihan Pengolahan Ikan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	DD				
		Ekonomi	Pelatihan Tata Boga	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	APBD Kab				
		Sosial Dan Budaya	Pelatihan LPMN	Nag.Amp.Parak	1	Lembaga	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	DD				
		Sosial Dan Budaya	Pelatihan MUI Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Lembaga	Ulama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	DD				
		Ekonomi	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	APBD Kab				
		Sosial Dan Budaya	Pelatihan KPMD	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	APBD Kab				
		Ekonomi	Pemb. TP-PKK Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Perempuan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	DD				
		Ekonomi	Pemberdayaan Kelembagaan Adat (KAN)	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat Adat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35,000,000	DD				
		Ekonomi	BBGRM Nagari	Nag.Amp.Parak	6	Kpg	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90,000,000	ADD				
		Sosial Dan Budaya	Peningkatan Kelompok Menjahit Perempuan	Nag.Amp.Parak	3	Klp	Perempuan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	71,000,000	DD				
		Sosial Dan Budaya	Pembiayaan Sanggar Seni Dan Budaya Anak Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Klp	Pemuda/i	√	√	√	√	√	√	√	√	√	210,176,900	APBD Prov				
		Sosial Dan Budaya	Pemberdayaan Group Randai	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	ADD				
		Ekonomi	Pelatihan dan Peningkatan Majelis Ta'lim	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	210,000,000	APBD Kab				
		Sosial Dan Budaya	Penghijauan Perkarangan Rumah	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	175,000,000	APBD Kab				
		Sosial Dan Budaya	Penghijauan Bukit	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,500,000,000	APBD/APBN				
		Ekonomi	Penanaman Cemara Laut	Nag.Amp.Parak	3	Kampung	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	990,000,000	APBD/APBN				
		Ekonomi	Penanaman Mangrof	Nag.Amp.Parak	3	Kampung	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,200,000,000	APBD/APBN				
		Ekonomi	Kesejahteraan Kader Dasa Wisma	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	140,000,000	DD				
		Ekonomi	Kesehatan UKK Nelayan Dan Tani	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	DD				
		Sosial Dan Budaya	Pengadaan Tenaga Medis di POSTU	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	APBD Kab				
		Ekonomi	Pelatihan Adat dan Syarak	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	APBD Kab				
		Sosial Dan Budaya	Peningkatan Kapasitas Aperatur Pemerintahan Nagari	Nag.Amp.Parak		Nagari	Aparatur Desa Nagari	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	ADD				
		Sosial Dan Budaya	Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2,500,000,000	APBD/APBN				
		Ekonomi	Konservasi Penyu (Penakaran)	Nag.Amp.Parak	1	Klp	Pemuda/i	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000,000	APBD/APBN				
		Sosial Dan Budaya	Pembinaan Keagamaan Pemuda dan Pemudi	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	ADD				
		Ekonomi	Pembinaan Organisasi Pemuda	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	DD				
		Sosial Dan Budaya	Pelatihan Penyulaman Bayang	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	DD				
		Ekonomi	Pengadaan Bantuan Alat perlengkapan POSYANDU	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	140,000,000	DD				
		Ekonomi	Pelatihan Qasidah Rabanah	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	DD				
Jumlah Per Bidang 3																281,462,716,200						
		Sosial Dan Budaya	Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Penjantan	Nag.Amp.Parak	6	Kampung	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	600,000,000	APBD Kab					
		Sosial Dan Budaya	Pengadaan Bantuan Ternak Itik dan Ayam	Nag.Amp.Parak	6	Kampung	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	300,000,000	APBD Kab					
		Sosial Dan Budaya	Pengadaan Bantuan Alat Tangkap Ikan	Nag.Amp.Parak	4	Kampung	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	APBD Kab					
		Sosial Dan Budaya	Pengadaan Batuan Pupuk Padi dan Sawit	Nag.Amp.Parak	6	Kampung	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	600,000,000	APBD Kab					
		Sosial Dan Budaya	Peng. Bantuan Bibit Padi / Sawit Untuk Peremajaan	Nag.Amp.Parak	6	Kampung	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	600,000,000	APBD Kab					
		Sosial Dan Budaya	Pengadaan Alat Panen Padi dan Sawit	Nag.Amp.Parak	1	Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBD Kab					
		Sosial Dan Budaya	Pelatihan Petani Kebun Sawit	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	APBD Kab					
		Ekonomi	Pelatihan IB	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	ADD					
		Ekonomi	Pelatihan Petani Peternakan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	APBD Kab					
		Sosial Dan Budaya	Pembentukan Kader Peduli Masyarakat	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBD Kab					
		Ekonomi	Penambahan kartu KIS dan Jamkesda	Nag.Amp.Parak	6	Kampung	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	600,000,000	APBD Kab					
		Ekonomi	Pelatihan Koperasi Untuk kelompok SPP	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	APBD Kab					
		Ekonomi	Pelatihan pembuatan Kompos	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	DD					
		Ekonomi	Pelatihan Pemb. Kerambah Ikan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	75,000,000	DD					
		Ekonomi	Pelatihan keterampilan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	DD					
		Ekonomi	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Dan Ternak	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	DD					

	Ekonomi	Pengadaan bantuan Mesin Produksi Pertanian	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√		√		√		300,000,000	DD			
--	---------	--	---------------	---	--------	------------	---	--	---	--	---	--	-------------	----	--	--	--

4	Pembinaan	Ekonomi	Pengadaan Bantuan Bibit Unggul Pertanian	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	DD			
		Ekonomi	Pengadaan Mesin Produksi Pakan Ternak	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√					
		Ekonomi	Pengadaan Ambulan Puskesmas	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat								√	500,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Bantuan Mesin dan Kapal Untuk Nelayan Miskin	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	2,000,000,000	APBD Prov			
		Ekonomi	Pengadaan Bantuan Kerambah Ikan Nila	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	DD			
		Ekonomi	Pelatihan Kelompok Tani	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	DD			
		Ekonomi	Pelatihan Kelompok nelayan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	DD			
		Ekonomi	Pemberdayaan POSKO P3KH	Nag.Amp.Parak	1	Posko	Paralegal		√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	DD			
		Sosial Dan Budaya	Pengadaan Bibit Unggul Kelapa Hibrida	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√		√		√				900,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Pengadaan Bibit Unggul Coklat,cengkeh Dan Pala (Perkebuna	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat		√		√		√		√	300,000,000	APBD Kab			
		Sosial Dan Budaya	Bantuan Modal Untuk GAPOKTAN	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	850,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Poging	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√								35,000,000	DD			
		Sosial Dan Budaya	Pelatihan Menjahit	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat		√		√		√		√	180,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	LPHT Padi Sawah,Bawang Merah dan Cabe Merah	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat		√		√		√		√	150,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Peningk. Kapasitas(Studi banding) Bagi Kelompok Tani	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat		√		√		√		√	90,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Pengadaan Rumpun	Nag.Amp.Parak	18	Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	270,000,000	DD			
		Ekonomi	Penambahan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	2,100,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Pernyataan Modal BUMNAG	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	700,000,000	DD			
		Sosial Dan Budaya	Peningkatan Kapasitas(Pelatihan & Keuangan) Kelompok KSB	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	ADD			
		Sosial Budaya	Gerakan Masyarakat Sehat	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	140,000,000	ADD			
		Sosial Dan Budaya	Pelatihan Perbengkelan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√		√		√		√		160,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Pelatihan Pembuatan Pestisida Nabati	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat		√		√		√		√	60,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Bantuan program Sapi Terintekgrasi kebun sawit	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√		√		√		√		2,000,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Pelatihan tenaga Insiminasi Buatan (IB)	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√		√		√		√		60,000,000	APBD Kab			
		Sosial Dan Budaya	Penga.Bantuan Bibit Unggul	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	APBD Kab			
		Sosial Dan Budaya	Lumbung Pangan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat			√						3,000,000,000	APBD Kab			
		Sosial Dan Budaya	Pengadaan Bibit Kelapa Dalam/Genjah	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat			√						500,000,000	APBD Kab			
		Sosial Dan Budaya	Peremajaan Kelapa Sawit Yang Sudah Tua	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat			√						600,000,000	APBD Kab			
		Sosial Dan Budaya	Penghijauan Bukit dan Pantai	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat			√						2,000,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Pengembangan Wisata Pantai	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	9,000,000,000	APBD/APBN			
		Ekonomi	Peningkatan Kesejahteraan Guru TK/PAUD	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Guru	√	√	√	√	√	√	√	√	800,000,000	DD			
		Ekonomi	Peningkatan Kesejahteraan Guru TPA/TPSA	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Guru	√	√	√	√	√	√	√	√	350,000,000	ADD			
		Ekonomi	Pelatihan Pengawetan Ikan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√		√		√		√		45,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Pengadaan Bantuan Mesin Tempel 40 Pk, 15 Pk ,5 Pk dan Me	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	150,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Pengadaan Bantuan Kerambah Jaring Apung Ikan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√		√		√		√		250,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Bantuan Bibit dan Pakan Ikan Nila/Lele	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√		√		√		√		260,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Bantuan Mesin Pencacah Jerami	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat		√		√		√		√	250,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	KKPI/KWT	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	600,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Penambahan Jaringan Tambak	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat									7,000,000,000	APBN			
		Sosial Dan Budaya	Pelatihan Kelompok Peternakan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat		√		√		√		√	5,000,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Pengadaan Alat Tangkap Ikan	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	350,000,000	DD			
		Ekonomi	Pengembangan Badan Usaha Kredit Kampung (UKM)	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	600,000,000	DD			
		Ekonomi	Prog. Peng. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√		√	√	√	√	70,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Pembersihan Kawasan Pantai Nagari Amp.Parak	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Belanja Kader	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	600,000,000	DD			
		Ekonomi	Pengadaan Pelampung	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	450,000,000	APBD Kab			
		Ekonomi	Pengadaan Keranda Jenajah	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	70,000,000	APBD Kab			
Sosial Dan Budaya	Penambahan Buku2 Perpustakaan Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	90,000,000	DD					
Ekonomi	Pengadaan Fiber	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	350,000,000	APBD Kab					
Ekonomi	Makanan Tambahan Bagi Balita	Nagari Amping Pa	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	350,000,000	DD					
Sosial Dan Budaya	Pengadaan Proyektor,Infokus,Leptop,Audio Visual,Printer SD	Nag.Amp.Parak	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	650,000,000	DD					
														399,302,716,200						
5	Kebencanaan	Sosial	Peng. Dapur Umum dan Logistik Darurat Bencana	Nagari Amping Pa	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	DD			
		Sosial	Pengadaan WC Darurat	Nagari Amping Pa	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	DD			
		Sosial	Pengadaan RTLH Untuk Korban Bencana	Nagari Amping Pa	1	Nagari	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	DD			
		Sosial																		
Jumlah Per Bidang 5															120,000,000					
Jumlah Total															792,508,511,000					

Mengetahui :
WALI NAGARI AMPING PARAK,



(YUSMARDI)

Amping Parak, Agustus 2017
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa
Ketua

(YENDRI)

Lampiran VI : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP- DESA) Tahun 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN : 2017

NAGARI : AMPING PARAK
 KECAMATAN : SUTERA
 KABUPATEN : PESISIR SELATAN
 PROVINSI : SUMATERA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat
	Bidang		Jenis Kegiatan			
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c.</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
		1	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat	Amping Parak	13	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari
		2	Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Amping Parak	12	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari
		3	Tunjangan Kehormatan Bamus	Amping Parak	5	Meningkatkan Kesejahteraan Bamus
		4	Tunjangan Program Jaminan Kesehatan & Keselamatan Kerja dan purnabakti Wali Nagari	Amping Parak	13	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari
		5	Tunjangan Wali Nagari dari Provinsi	Nag.Amp.Parak	2	Wali Nagari
		6	Operasional Bamus	Nag.Amp.Parak	5	Meningkatkan Kesejahteraan Bamus
		7	Operasional Perkantoran	Nag.Amp.Parak	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari
		8	Perencanaan Pembangunan Nagari	Nag.Amp.Parak		Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari
		9	Pelaksanaan Musrenbang	Nag.Amp.Parak	1 Paket	Peerencanaan Pembangunan Nagari

1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10	Operasional Pemungutan PBB-P2	Amping Parak	6 Kmpg	Masyarakat
		11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nag.Amp.Parak		Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari
		12	Pemutakhiran Data Aset Pemerintahan Nagari	Nagari Amping Parak	6 Kmpg	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari
		13	Pemeliharaan Gedung kantor	Nagari Amping Parak		Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari
		14	Kegiatan PHBI	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
		15	Operasional RASKIN 2016	Nagari Amping Parak		Masyarakat
		16	Kegiatan PHBN	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
		17	Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari/Bamus	Nagari Amping Parak		Perangkat Nagari
		16	Partisipasi Lomba Anak Nagari	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
		17				
		18				
Jumlah						
		1	Peningkatan Jalan Usaha Tani Alai	Alai		Kelompok Tani
		2	Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Amping Parak		Sebagai Jarinagn Irigasi
		3	Pembukaan Jalan Baru	Alai		Masyarakat
		4	Peningkatan JUT	Alai	1200 M	Masyarakat
		5	Pembangunan Jln. Rabat Beton	Padang Lawe		Masyarakat
		6	Normalisasi Sungai	Amping Parak	1 Paket	Masyarakat
		7	Pengadaan MCK Konservasi Penyu	Ps. Amping Parak	1 Paket	Masyarakat

8	Peningkatan Jln. Tjg. Bungo Kt.Trk. ke Pdg. Tae	Koto Tarok		Masyarakat
9	Peningkatan Jalan dan Parit Miring	Ujung Air	300 M	Masyarakat
10	Peningkatan Jalan PNPM TA.2009	Padang Tae		Masyarakat
11	Pembuatan Saluran Drainase	Nagari Amping Parak	6 Kmpg	Masyarakat
12	Kegiatan Pembentukan BUMNAG. Amping Parak	Amping Parak		Masyarakat
13	Pembukaan Jalan Baru Kampung	Nagari Amping Parak	1 Paket	Masyarakat
14	Pengadaan Tambatan Perahu dan Rumpon	Amping Parak		Masyarakat
15	Pengadaan dan Pembinaan Sanggar Seni Anak Nagari	Amping Parak		Masyarakat
16	Pembuatan Drainase Air Busuk Kampung Alai	Alai		Masyarakat
17	Pengadaan RTLH/Rumah Tidak Layak Huni	Amping Parak	2 Paket	Masyarakat
18	Peningkatan Jalan Usaha Tani Dan Plat Dekker Kampung Ujung air	Ujung Air		Masyarakat
19	Pembuatan Jalan Baru Kampung Pasar Amping Parak	Ps. Amping Parak		Masyarakat
20	Pembuatan Pagar,WC Dan Mobiler POSKESRI Padang Lawe	Padang Lawe		Masyarakat
Jumlah Per Bidang 2				
1	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban LINMAS Nagari	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
2	Honorarium Kader YANDU	Nag.Amp.Parak		Kader Nagari
3	Honorarium Kader KB	Nag.Amp.Parak		Kader Nagari
4	Honorarium IMAM,KHATIB,GHARIN	Nag.Amp.Parak		Pengurus Masjid/Mushalla

3 Pembinaan

5	Peningkatan Kapasitas KSB Nagari	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
6	Operasional Kelembagaan Adat (KAN)	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
7	Pembinaan Kesenian Dan Kebudayaan (Pembelian Alat-alat Kesenian)	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
8	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
9	Kegiatan Pembinaan TP-PKK Nagari	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
10	Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
11	Kegiatan Peningkatan Nilai Kebangsaan	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
12	Insentif / Honor Kader Dasa Wisma	Nag.Amp.Parak		Kader Nagari
13	Insentif Kader Poskes Nelayan Dan Tani	Nag.Amp.Parak		Kader Nagari
14	Pengadaan Alat2 Posyandu	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
15	Pelatihan/Insentif Kelompok Tani d Nelayan	Amping Parak	1 Paket	Kelompok Tani

Jumlah Per Bidang 3

4 Pemberdayaan

1	Kegiatan Pelatihan LPMN	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
2	Kegiatan Pemberdayaan Bulan Bakti Goro Masyarakat (BBGRM)	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
3	Pelatihan Wali Nagari danPerangkat Nagari	Nag.Amp.Parak		Perangkat Nagari
4	Study Banding Wali Nagari Dan Perangkat	Nag.Amp.Parak		Perangkat Nagari
5	Kegiatan Pengembangan BUMNAG (Belan Modal, Pelatihan Dan Study banding)	Nag.Amp.Parak		Pengurus BumNag
6	Belanja Kader PPKBD	Nag.Amp.Parak		Kader Nagari
7	Kegiatan Program Makanan Tambahan (PMT) Balita	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
8	Honorarium Guru TK/PAUD	Nag.Amp.Parak		Guru Paud

	9	Pelatihan MUN	Nag.Amp.Parak		Masyarakat
	10	Pelatihan BAMUS	Nag.Amp.Parak		Bamus
	11	Honorarium Guru TPA/TPSA	Nag.Amp.Parak		Guru Mengaji
		Jumlah Per Bidang 4			
		Jumlah Total			

Mengetahui :
Wali Nagari Amping Parak,

YUSMARDI

(RKP-DESA)

Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
	199,900,000	ADD				
	61,550,000	ADD				
	49,200,000	ADD				
	3,600,000	ADD				
	12,000,000	ADD				
	10,000,000	ADD				
	28,000,000	ADD				
	11,680,000	ADD				
	18,482,000	ADD				

	9,133,000	ADD				
	65,517,000	ADD				
	5,000,000	ADD				
	10,541,000	ADD				
	3,000,000	ADD				
	20,441,000	ADD				
	5,487,000	ADD				
	6,731,000	ADD				
	25,423,300	ADD				
Per Bidang 1	545,685,300					
	150,000,000	DD				
	700,000,000	APBN				
	80,000,000	DD				
	81,000,000	DD				
	120,000,000	DD				
	300,000,000					
	20,000,000	DD				

	200,000,000	DD				
	90,000,000	DD				
	150,000,000	DD				
	190,750,000	DD				
	80,000,000	DD				
	100,000,000	DD				
	40,000,000	DD				
	150,000,000	DD				
	165,000,000	DD				
	30,900,000	DD				
	165,000,000	DD				
	135,000,000	DD				
	100,000,000	DD				
	3,032,299,000					
	21,000,000	ADD				
	42,000,000	ADD				
	5,040,000	ADD				
	39,600,000	ADD				

	16,635,000	DDS				
	3,500,000	ADD				
	25,000,000	ADD				
	3,500,000	DD				
	8,000,000	DD				
	42,975,000	DD				
	5,487,000	DD				
	7,200,000	DDS				
	7,200,000	DDS				
	10,000,000	ADD				
	9,039,400	DD				
	246,176,400					
	5,000,000	DD				
	11,662,500	DD				
	3,976,000	ADD				
	30,000,000	ADD				
	80,000,000	DD				
	600,000	DDS				
	20,000,000	DD				
	90,000,000	DDS				

	5,000,000	ADD				
	5,000,000	ADD				
	115,200,000	DDS				
	375,477,900					
	4,199,638,600					

Amping Parak, 14 Maret 2017

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa

Y E N D R I

DAFTAR USULAN RKP DESA

TAHUN : 2017

NAGARI : AMPING PARAK
 KECAMATAN : SUTERA
 KABUPATEN : PESISIR SELATAN
 PROVINSI : SUMATERA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat	Nagari Amping Parak		Perangkat Nagari	12 Bln	199,900,000
		2	Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Nagari Amping Parak		Perangkat Nagari	12 Bln	61,550,000
		3	Tunjangan Kehormatan Bamus	Nagari Amping Parak		Bamus	12 Bln	49,200,000
		4	Tunjangan Program Jaminanan Kesenatan & Keselamatan Kerja dan purnabakti Wali Nagari	Nagari Amping Parak		Perangkat Nagari	12 Bln	3,600,000
		5	Tunjangan Wali Nagari dari Provinsi	Nagari Amping Parak		Wali Nagari		12,000,000
		6	Operasional Bamus	Nagari Amping Parak		Bamus	12 Bln	10,000,000
		7	Operasional Perkantoran	Nagari Amping Parak		Perangkat Nagari	12 Bln	28,000,000
		8	Pendataan Profil Nagari	Nagari Amping Parak		Perangkat Nagari		
		9	Pelaksanaan Musrenbang	Nagari Amping Parak		Masyarakat	2 Kali	18,482,000
		10	Operasional Kolektor PBB	Nagari Amping Parak		Perangkat Nagari	12 Bln	9.133..000
		11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nagari Amping Parak		Perangkat Nagari	12 Bln	65,517,000
		12	Rehap kantor KAN Kenagarian Amping Parak	Nagari Amping Parak				
		13	Pelatihan dan Study Banding Aparatur Nagari	Nagari Amping Parak		Perangkat Nagari	1 Kali	30,000,000
		14	Pemutakhiran Data Aset Pemerintahan Nagari	Nagari Amping Parak		Perangkat Nagari	12 Bln	5,000,000
		15	Pembuatan Pagar Kantor Wali Nagari	Nagari Amping Parak				
		16	Kegiatan PHBI	Nagari Amping Parak		Masyarakat	12 Bln	3,000,000
		17	Operasional RASKIN 2016	Nagari Amping Parak		Masyarakat	12 Bln	20,441,000
		18	Kegiatan PHBN	Nagari Amping Parak		Masyarakat	12 Bln	5,487,000
		19	Perencanaan Pembangunan Nagari	Nagari Amping Parak		Masyarakat	1 Kali	11,680,000
		20	Partisipasi Lomba Anak Nagari	Nagari Amping Parak		Masyarakat	12 Bln	25,423,300
		21						
Jumlah Per Bidang 1								549,280,300
2	Pembangunan Desa	1	Pengadaan Tambatan Perahu Dan Rumpon	Nagari Amping Parak		Masyarakat		40,000,000
		2	Pembuatan Jln. Masuk ke Jln. Lingkar Wisata Ps.Amp.Parak	Nagari Amping Parak				
		3	Peningkatan Jalan Tanjung Bungo	Nagari Amping Parak				
		4	Pembangunan Jln. Rabat Beton	Nagari Amping Parak				
		5	Normalisasi Sungai	Nagari Amping Parak		Masyarakat		1,200,000,000
		6	Peningkatan JUT	Nagari Amping Parak		Masyarakat		84,270,000
		7	Pengadaan MCK	Nagari Amping Parak		Masyarakat		20,000,000
		8	Peningkatan Jalan dan Parit Miring	Nagari Amping Parak		Masyarakat		90,000,000
		9	Pemeliharaan Cemara Pantai & Hutan Bakau	Nagari Amping Parak				
		10	Pembuatan Saluran Drainase	Nagari Amping Parak		Masyarakat		190,750,000
		11	Pembuatan Drainase Air Busuk Kampug Alai	Nagari Amping Parak		Masyarakat		165,000,000
		12	PengadaanRumah Tidak Layak Huni/RTLH	Nagari Amping Parak		Masyarakat		15,479,000
		13	Peningkatan Jln Usaha Tani dan Plat Dekker Kamp.Ujung Air	Nagari Amping Parak		Masyarakat		165,000,000
		14	Pembuatan Jalan Baru Kampung Pasar Amping Parak	Nagari Amping Parak		Masyarakat		135,000,000
		15	Kegiatan Pembentukan BUMNAG. Amping Parak	Nagari Amping Parak				

		16					
Jumlah Per Bidang 2							2,186,499,000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban LINMAS Nagari	Nagari Amping Parak		Masyarakat	21,000,000
		2	Honorarium Kader YANDU	Nagari Amping Parak		Masyarakat	42,000,000
		3	Honorarium Kader KB	Nagari Amping Parak		Masyarakat	5,040,000
		4	Honorarium IMAM,KHATIB,GHARIN	Nagari Amping Parak		Masyarakat	39,600,000
		5	Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan	Nagari Amping Parak		Masyarakat	42,975,000
		6	Peningkatan Kapasitas KSB Nagari	Nagari Amping Parak		Masyarakat	16,635,000
		7	Operasional Kelembagaan Adat (KAN)	Nagari Amping Parak		Masyarakat	3,500,000
		8	Kegiatan Pembinaan TP-PKK Nagari	Nagari Amping Parak		Masyarakat	8,000,000
		9	Kegiatan Pelatihan Nilai Kebangsaan	Nagari Amping Parak		Masyarakat	5,487,000
		10	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	Nagari Amping Parak		Masyarakat	3,500,000
		11	Insentif Kader Poskes Nelayan Dan Tani	Nagari Amping Parak		Masyarakat	7,200,000
		12	Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan	Nagari Amping Parak		Masyarakat	42,975,000
		13	Pengadaan alat2 posyandu	Nagari Amping Parak	1 Unit	Masyarakat	10,000,000
		14	Insentif Kader Poskes Nelayan Dan Tani	Nagari Amping Parak		Masyarakat	7,200,000
		15	Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	Nagari Amping Parak		Masyarakat	5,000,000
Jumlah Per Bidang 3							255,112,000
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Study Banding Perangkat Nagari	Nagari Amping Parak		Perangkat Nagari	30,000,000
		2	Kegiatan Pelatihan BAMUS Nagari	Nagari Amping Parak		Bamus	3,000,000
		3	Kegiatan Pelatihan LPMN	Nagari Amping Parak		Masyarakat	5,000,000
		4	Kegiatan Pelatihan MUN	Nagari Amping Parak		Masyarakat	5,000,000
		5	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Nelayan	Nagari Amping Parak		Masyarakat	9,039,000
		6	Kegiatan Pemberdayaan Bulan Bakti Goro Masyarakat (BBGRM)	Nagari Amping Parak		Masyarakat	11,662,500
		7	Kegiatan Pengembangan BUMINAG (Belan Modal, Pelatihan Dan Study Banding)	Nagari Amping Parak		Masyarakat	80,000,000
		8	Kegiatan Program Makanan Tambahan (PMT) Balita	Nagari Amping Parak		Masyarakat	25,200,000
		9	Honorarium Guru TK/PAUD	Nagari Amping Parak		Guru Paud	90,000,000
		10	Kegiatan Program Makanan Tambahan (PMT) Balita	Nagari Amping Parak		Masyarakat	20,000,000
		11	Pelatihan Wali Nagari Dan Perangkat	Nagari Amping Parak		Perangkat Nagari	3,976,000
		12	Honorarium Guru TPA/TPSA	Nagari Amping Parak		Masyarakat	115,200,000
		13	Belanja Kader PPKBD	Nagari Amping Parak		Kader	600,000
Jumlah Per Bidang 4							398,677,500
JUMLAH TOTAL							3,355,726,800

Mengetahui
Wali Nagari

YUSMARDI

Amping Parak, 14 Maret 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

YENDRI



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI AMPING PARAK
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
2017- 20123**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AMPING PARAK,**

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 6 (enam) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
 2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RPJM Nagari Tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2017 s.d 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua : Tim Penyusun RPJM Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari
 2. Merumuskan Draf Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) Tahun 2017 s.d 2023
 3. Menyelenggarakan Pengkajian Keadaan Nagari Tingkat dusun dalam menentukan skala Prioritas
 4. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN agari) tahun 2017 s.d 2023
- Ketiga :

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya ,tim Penyusun RPJM Nagari bertanggung jawab kepada wali nagari;

Masa Jabatan Tim Penyusun RPJM Nagari adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Rencana

Kelima : Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari)
Tahun 2017 s.d 2023

Keenam : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Amping Parak Tahun 2017;

Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Amping Parak
Pada Tanggal : 2017

Wali Nagari Amping Parak



(YUSMARDI)

Lampiran Keputusan Wali Nagari Amping Parak
Nomor 2 tahun 2017
Tanggal 23 Januari 2017

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari)
TAHUN 2017
NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA

No .	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1.	YUSMARDI	Wali Nagari	Penanggung jawab dan Koordinator
2	YENDRI	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
3	KHIRNAISON	Ketua LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
4	RUDI HARTONO,SE	Kaur Perencanaan	Anggota
5	SYAFRIDAL	Kepala Kampung	Anggota
6	SUHELMI	Kepala Kampung	Anggota
7	MARDELISON	Kepala Kampung	Anggota
8	DOL MARSIKAL	Kepala Kampung	Anggota
9	ALI MARDI	Kepala Kampung	Anggota
10	SYAHRIAL	Kepala Kampung	Anggota

11	GUSTI MURNI	KADER	Anggota
----	-------------	-------	---------